

351.845
ROF
1 21

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN (P2KP) DI DESA CEPIRING KECAMATAN
CEPIRING KABUPATEN KENDAL

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



Diajukan oleh :

Hj. SITI ROFIAH . AR

D 4 E 0 0 0 3 1

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

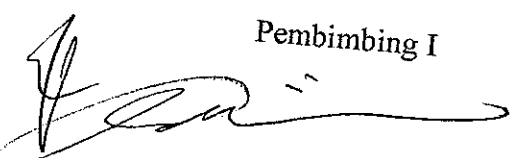
2002

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN (P2KP) DI DESA CEPIRING KECAMATAN
CEPIRING KABUPATEN KENDAL


NAMA PENULIS : Hj. SITI ROFIAH .AR
NIM : D4E000031

Tesis telah disetujui :
Tanggal : 1 APRIL 2002

Pembimbing I


(Drs. Wahyu Pujoyono, S.U)

Pembimbing II


(Drs. Hardi Warsono, MTP)

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI DESA CEPIRING KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

Dipersiapkan dan disusun oleh

Hj. SITI ROFIAH AR

D 4 E 0 0 0 3 1

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

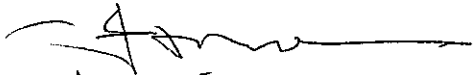
Pada tanggal April 2002

Susunan Tim Penguji



Drs. Wahyu Pujoyono, S.U

Pembimbing I



Drs. Hardi Warsono, MTP

Pembimbing II

Anggota Tim Penguji lain :



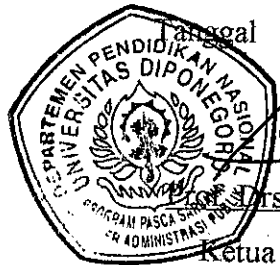
Drs. Zaenal Hidayat, M.A



Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 01 APR 2002



Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD

Ketua Program Studi M A P

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Reguklah ilmu dengan belajar sejak dari ayunan sampai ke liang lahat

Persembahan :

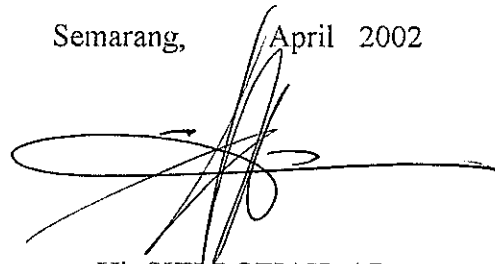
Kupersembahkan untuk orang-orang tercinta :

1. Ayah dan Bunda tercinta
2. Suami dan anak-anak tercinta
3. Anak menantu dan cucu tersayang
4. Kakak dan adik tercinta

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, April 2002



Hj. SITI ROFLAH .AR

ABSTRAKSI

ROFIAH A.R. Implementation of Urban Cooperatives Development Project (P2KP) at Cepiring Village, Cepiring Sub-district, Kendal Regency. Public Administration. Post Graduate Program. Diponegoro University, 2002

Doing evaluation by conducting research on public policy is essential for the development of government's role as a public agent. Based on the result of the research the government can make revision and betterment of the policy.

Urban Cooperatives Development Project (P2KP) is a public policy arranged to anticipate the effects of monetary and economic crises in Indonesia. Through this project the government aimed at helping the crisis victims to increase their earnings.

Cepiring village, Cepiring sub-district, Kendal regency is one among P2KP target locations. Therefore it is elected as location of this research, which used survey method with 60 respondents who werw purposively selected out of 46 Community's Self-Reliant Groups (KSM) as P2KP participants.

Result of this research shows that P2KP implementation in Cepiring village was 80 % effective. Data analysis using Rank-Kendall statistical formula shows that socio economic, leadership and communication influence the effectivity of P2KP implementation.

It is suggested that selection of program participants should be accurate. Therefore the government's program or policy can be effective. This research also proves C. Korten's theory that a development program will be successful if this program is suited with the interest, capability and needs of the program participants.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga memiliki kemampuan menyelesaikan tugas Tesis dengan judul “ Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal “ dengan spesifikasi pendekatan pengaruh sosial ekonomi, kepemimpinan, dan komunikasi terhadap efektivitas P2KP.

Meskipun dalam penyusunan Tesis ini penulis telah menggunakan segala daya dan kemampuan, tetapi penulis menyadari masih banyak kekuarangan dan kelemahannya baik dalam penggunaan bahasa maupun penalaran ilmiah. Hal tersebut terpulng pada keterbatasan kemampuan penulis.

Penulis juga menyadari banyak pihak yang telah membantu, baik secara moril maupun materiil hingga terselesainya penyusunan Tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD, Ketua Program Studi Pasca Sarjana MAP Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs. Wahyu Pujoyono, S.U, sebagai Pembimbing I
4. Bapak Drs.Hardi Warsono, MTP, sebagai Pembimbing II

5. Bapak Heru Poernomo, R.R, SH, Camat Kendal Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.
6. Bapak Zaenal Abidin, Lurah Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.
7. Kepala Dinas P dan K beserta staf Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
8. Keluarga besar BKM Kurnia Jaya P2KP Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.
9. Bapak Makmun, S.Pd, Kepala sekolah SDN Sriwulan II beserta rekan-rekan guru Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah serta seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Konsentrasi Magister Administrasi Publik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini.
11. Ayah dan Ibunda tercinta yang selalu berdoa untuk keberhasilan ananda.
12. Kakak dan adik beserta isteri yang selalu memberikan bantuan moril dan materiil untuk keberhasilan penulis.
13. Suamiku Drs. H. Moh. Soewindi bin Wasiran, anakku Hj. Dra. Siti Aisyah Yuni Widiarti dan suami, Dini Widiastuti, dan Yusuf Yulianto yang tercinta serta cucu-cucuku tersayang, yang selalu setia mendampingi diriku dalam duka dan suka dalam menempuh pendidikan ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
14. Kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis hanya berharap, semoga saja Tesis ini masih bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkompeten dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, April 2002

Penulis

(Hj. Siti Rofiah. AR)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	12
2.2. Pembahasan Penelitian Yang Relevan	36
2.3. Hipotesis	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Rancangan Penelitian	40
3.2. Ruang Lingkup	40
3.3. Lokasi Penelitian	41
3.4. Variabel Penelitian	
3.4.1. Klasifikasi Variabel	41

3.4.2. Definisi Konseptual	42
3.4.3. Definisi Operasional	42
3.5. Jenis dan Sumber Data	45
3.6. Instrumen Penelitian	46
3.7. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	46
3.8. Teknik Pengumpulan Data	48
3.9. Teknik Pengolahan Data	49
3.10. Teknik Analisis Data	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Hasil Penelitian	54
4.1.1. Gambar Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.2. Data dan Interpretasi	64
4.1.2.1. Identitas Responden	66
4.1.2.2. Efektivitas P2KP (Y)	68
4.1.2.3. Status Sosial Ekonomi (X1)	78
4.1.2.4. Kepemimpinan (X2)	89
4.1.2.5. Komunikasi (X3)	96
4.1.3. Rekapitulasi Kondisi Variabel Penelitian	104
4.1.3.1. Efektivitas P2KP (Y)	107
4.1.3.2. Status Sosial Ekonomi (X1)	109
4.1.3.3. Kepemimpinan (X2)	111
4.1.3.4. Komunikasi (X3)	113
4.2. Uji Hipotesa	114
4.2.1. Analisa Tabel Silang	114
4.2.2. Analisa Statistik	121
4.2.2.1. Hubungan Antara X1 dan Y	124
4.2.2.2. Hubungan Antara X2 dan Y	127
4.2.2.3. Hubungan Antara X3 dan Y	130
4.2.2.4. Hubungan Antara X1,X2,X3 dan Y	134
4.3. Diskusi	136

BAB V	: PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	139
5.2.	Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Development Performance	13
2. Geometrik Hipotesis	39

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Operasional Penelitian	44
2. Luas Wilayah dan Perumtukannya Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	55
3. Jumlah Penduduk Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Berdasarkan Usia / Golongan Umur	57
4. Jumlah Penduduk Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Berdasarkan Mata Pencaharian	61
5. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (5 Th. Keatas)	63
6. Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	64
7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
8. Jumlah Responden Berdasarkan Usia	66
9. Jumlah Responden Berdasarkan Mata Pencaharian	67
10. Kelompok Swadaya Masyarakat Pilihan Responden	68
11. Kebebasan Mengajukan Usul Atau Ide	69
12. Kegiatan KSM Yang Sesuai Pilihan	69
13. Keuntungan Responden Mengikuti P2KP	71
14. Kerugian Disebabkan P2KP	72
15. Usaha Ekonomi Produktif Lebih Menguntungkan Masyarakat	72
16. Penilaian Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan P2KP	73
17. Peranan Anggota Dalam KSM/BKM	73
18. Kesanggupan Anggota KSM Membuat Usul Kegiatan P2KP	74
19. Cara Merumuskan Usulan Kegiatan P2KP	75
20. Kegiatan Diluar P2KP	75

21	Persepsi Terhadap Tingkat Suku Bunga Pinjaman	76
22	Persepsi Terhadap Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman	77
23	Persepsi Terhadap Tanggung Renteng Anggota KSM	77
24	Tingkat Pendidikan	79
25	Pendidikan Diluar Sekolah	79
26	Kemampuan Membaca dan Menulis	80
27	Informasi Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan	80
28	Pendapatan Responden Per tahun	81
29	Pendapatan Responden Per Bulan	82
30	Pendapatan Diluar Pekerjaan Pokok	82
31	Pendapatan Tambahan Dari P2KP	83
32	Kepemilikan Rumah	84
33	Kepemilikan Sawah/Tegalan	84
34	Pemeliharaan Ternak	85
35	Penanam Pohon Tahunan	86
36	Tanggungjawab Anak	86
37	Tanggungjawab Keluarga	87
38	Tanggungjawab Keluarga Diluar Rumah	87
39	Pengeluaran Biaya Hidup Per Bulan	88
40	Wewenang Melaksanakan P2KP	89
41	Kepercayaan Aparatur Kelurahan Terhadap Pelaksanaan P2KP ...	90
42	Program Lain Yang Diajukan Desa	90
43	Pujian Kepala Desa	91
44	Petunjuk Dan Bimbingan Aparatur Desa	91
45	Contoh Dari Aparatur Desa	92
46	Petunjuk Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan	93
47	Peranan Aparatur Desa Dalam Memecahkan Masalah	93
48	Mekanisme Pemilihan P2KP	94
49	Persepsi Terhadap Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	94
50	Keberhasilan Desa Lain Sebagai Stimulus	95

51	Persepsi Terhadap Peran P2KP	96
52	Bimbingan Dari Aparatur Pemerintah	97
53	Tingkat Kesulitan P2KP	97
54	Pembinaan Staf Kelurahan	98
55	Penilaian Terhadap Komunikasi Dengan Petugas Lapangan	99
56	Persepsi Terhadap Tanggapan Petugas Lapangan	99
57	Penyampaian Kritik dan Tanggapan Aparatur Desa	100
58	Cara Melakukan Bimbingan Aparatur Desa	100
59	Respon Aparatur Terhadap Ide Peserta Program	101
60	Komunikasi Antara Anggota	101
61	Komunikasi Antar Kelompok Swadaya Masyarakat	102
62	Mengevaluasi Kegagalan Program Dengan Sesama Kelompok	103
63	Mengevaluasi Program Dengan Kelompok Lain	103
64	Skore Jawaban Responden	105
65	Klasifikasi Skor	106
66	Klasifikasi Penilaian Variabel Efektivitas P2KP	107
67	Kategorisasi Skore Variabel Efektivitas P2KP	108
68	Klasifikasi Penilaian Variabel Status Sosial Ekonomi	109
69	Kategorisasi Skore Variabel Status Sosial Ekonomi	110
70	Klasifikasi Penilaian Variabel Kepemimpinan	111
71	Kategorisasi Skore Variabel Kepemimpinan	112
72	Klasifikasi Penilaian Variabel Komunikasi	113
73	Kategorisasi Skore Variabel Komunikasi	114
74	Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Efektivitas P2KP	116
75	Hubungan Kepemimpinan dengan Efektivitas P2KP	118
76	Hubungan Komunikasi dengan Efektivitas P2KP	120
77	Hubungan Antar Variabel Berdasarkan Ranking	122
78	Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Efektivitas P2KP	124
79	Tanda + Tanda -	124
80	Hubungan Kepemimpinan dengan Efektivitas P2KP	127

81	Tanda + Tanda -	127
82	Hubungan Komunikasi dengan Efektivitas P2KP	130
83	Tanda + Tanda -	131
84	Hubungan Status Sosial Ekonomi, Kepemimpinan, Komunikasi dengan Efektivitas P2KP	134

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Daftar Pertanyaan
- 2 Tabulasi Distribusi Nilai Variabel
- 3 Hasil Kuesioner Penelitian Variabel Efektivitas P2KP (Y1)
- 4 Hasil Kuesioner Penelitian Variabel Status Sosial Ekonomi (X1)
- 5 Hasil Kuesioner Penelitian Variabel Kepemimpinan (X2)
- 6 Hasil Kuesioner Penelitian Variabel Komunikasi (X3)
- 7 Data Komulasi Jawaban Responden Secara Nominal
- 8 Nonparametric Correlations Rank-Kendall

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rencana Pelita VI merupakan tahapan tinggal landas bagi bangsa Indonesia, setelah melaksanakan pembangunan lima tahunan dari Pelita I sampai Pelita V, ternyata gagal total. Bangsa Indonesia selama pelaksanaan Pembangunan Nasional 25 (dua puluh lima) tahun, ternyata menyisakan jarak yang makin lebar antara penduduk di bawah garis kemiskinan dengan kelompok masyarakat kaya. Program pengentasan kemiskinan yang menghabiskan anggaran negara tidak pernah berhasil secara signifikan. Keberhasilan yang tercatat lebih bersifat *lips service* atau data palsu, tetapi data di lapangan menunjukkan tingkat penyelewengan program dengan berbagai manipulasi dan korupsi. Program Intensifikasi Desa Tertinggal (IDT) misalnya, bukannya mengangkat ketertinggalan desa menjadi sejajar dengan daerah yang dikategorikan lebih maju, tetapi lebih menambah beban masyarakat desa. Hal tersebut disebabkan oleh perencanaan program IDT yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima program. Perencanaan yang datang dari atas tidak akan pernah menyentuh kebutuhan masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program

IDT di Kabupaten Kendal yaitu program gaduhan ternak di daerah yang sulit di dapatkan sumber air. Di daerah yang kesulitan air tentu saja menyebabkan sulitnya pakan ternak yang dipergunakan untuk memelihara ternak gaduhan. Akibatnya tambahan beban pekerjaan pada masyarakat miskin untuk mencari pakan ternak sampai daerah lain menjadi salah satu penyebab kegagalan program gaduhan ternak. Banyak program di masa pemerintahan Orde Baru yang ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat kecil dan miskin hanya bersifat politis. Program-program pemerintah Orde Baru tersebut seringkali bertujuan politis untuk memenangkan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum, yang menargetkan mayoritas tunggal.

Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, berdampak pada krisis kepercayaan yang menjatuhkan rezim Orde Baru. Era reformasi yang dimaknai dengan restrukturisasi, reorganisasi dan reorientasi tatanan kehidupan bernegara, berbangsa dan berpemerintahan dengan titik sentral banggunya ekonomi Indonesia yang terpuruk berjalan sangat alot karena berkaitan dengan kultural yang terbentuk selama kurang lebih 30 tahun Orba, struktur dan sistem pemerintahan yang tidak demokratis, ternyata membangun ekonomi yang terlanjur porak poranda tidaklah segampang perencanaannya. Apalagi pertikaian politik dan perebutan kekuasaan, semakin membuat krisis ekonomi bagai kekuasaan, semakin membuat krisis ekonomi bagai benang kusut yang sulit diuraikan.

Dalam situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, golongan yang menderita adalah masyarakat miskin yang ada di perkotaan. Kultur daerah perkotaan yang berbeda dengan daerah pedesaan dengan asumsi bahwa masyarakat kota sebagai masyarakat konsumtif, yang berusaha di sektor-sektor non-formal, mempunyai ketergantungan yang lebih tinggi pada pertumbuhan ekonomi. berbeda dengan masyarakat pedesaan, yang hidup dari sektor produksi pertanian, perkebunan dan/atau perikanan, dengan kultur yang lebih sederhana, manajemen keuangan dari masa panen ke masa panen berikutnya, mencegah masyarakat desa berperilaku konsumtif.

Masalah kemiskinan selalu menjadi ancaman yang sewaktu-waktu dapat meledak. Seperti Bom Waktu yang disiagakan untuk menjatuhkan pemegang kuasa atau golongan masyarakat yang lebih menikmati kemakmuran. Permasalahan yang substansial adalah masihkah keberpihakan kepada kemiskinan merupakan moralitas yang dikedepankan ? Seperti telah dikemukakan, bantuan pada masyarakat miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah, baik dalam masa Orde Baru, masa pemerintahan B.J. Habibie, pemerintahan Abdurachman Wahid dan pemerintahan Megawati yang sedang berjalan saat ini. Tetapi masyarakat miskin masih saja terus berteriak bahwa bantuan pemerintah masih sangat kurang, bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin hanya bersifat politis, bukan kebijakan yang menyentuh substansi kebutuhan masyarakat miskin.

Padahal dari pihak pemberi bantuan beranggapan bahwa bantuan yang diberikan sudah cukup, bahkan berlebihan.

Ada beberapa hipotesis yang dapat diajukan untuk melihat gejala dan penyebab terjadinya persoalan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan masyarakat miskin. Hipotesa pertama, bantuan kepada orang miskin tersebut memang ada, tetapi tidak sampai kepada masyarakat miskin sesuai rencana. Hipotesa kedua, bantuan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin atau terjadi kesalahan program sasaran. Hipotesa ketiga, bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin memang masih terlalu kecil jumlahnya. Keterbatasan dana bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin dapat dilihat misalnya didalam program penciptaan lapangan kerja, padat karya perkotaan, alokasi dana Rp. 50.950.000.000,00 dibagi untuk Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pemasang, dan Kabupaten Tegal. Berarti masing-masing kota mendapatkan dana Rp.8.491.666.600,00. Jika satu kota terdiri dari 16 Kecamatan, maka masing-masing Kecamatan menerima Rp.52.604.162,00. Dan jika satu Kecamatan 16 (enam belas) Kelurahan maka masing-masing Kelurahan menerima Rp.3.287.760,00. Dengan uang hanya sebesar Rp.3.287.760,00 dengan program penciptaan lapangan kerja maka dapat dipahami sampai sejauh mana keberhasilan program tersebut, yang merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS). (Laporan JPS, BAPEDA Jateng, Th. 1999)

Marjono dalam tulisannya “Bom waktu itu bernama Kemiskinan”, (Suara Merdeka, 12 Juli 2001), mengemukakan Pertama, bantuan itu benar telah masuk desa, tapi warga miskin tidak pernah mengenyam bantuan tersebut. Sehingga terjadi dislokasi bantuan. Kedua, bantuan itu tidak seperti yang mereka harapkan. Artinya bisa saja terjadi mis-alokasi dana bantuan.

Sesuatu yang berkaitan dengan bantuan atau sejumlah dana yang tidak sedikit untuk tujuan yang tidak begitu jelas, artinya akuratisasi datanya masih perlu diuji, memang mempunyai beberapa kemungkinan. Kalau hipotesa Marjono di atas, yang terjadi adalah hipotesa pertama, maka telah terjadi manipulasi data yang menyebabkan bantuan tidak tepat pada kelompok sasaran yang memang sangat membutuhkan bantuan. Kejadian salah sasaran (atau kesengajaan) banyak terjadi pada masa Orba. Karena pembentukan kelompok sasaran dikaitkan dengan yang mau mendukung Golkar. Akibatnya, justru kelompok yang dibentuk bukan masyarakat miskin yang memerlukan bantuan tetapi kelompok yang loyal terhadap Golkar, biasanya pegawai negeri dan aparat Kelurahan. Demikian pula jika yang terjadi adalah hipotesa kedua yang dikemukakan oleh Marjono, terjadi mis alokasi dana bantuan. Bantuan yang seharusnya diperuntukkan masyarakat miskin dialokasikan untuk kegiatan lain.

Mengamati dan mempelajari masalah kebijakan bantuan kepada masyarakat miskin, bukan lagi masalah moral dan mentalitas orang per orang atau kelompok per kelompok, tetapi sudah merambah ke masalah struktural.

David Easton (1990) mengemukakan tentang struktural secara konseptualisasi ada 2 (dua), yakni :

1. Struktural sebagai kendala, jika struktural tersebut membatasi gerak dan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan program. Struktural sebagai kendala ini dapat memperlancar praktek pemerintah dan kekuasaan. Karena pemegang kekuasaan sekaligus pengambil keputusan dapat memaksakan kehendaknya secara otoriter. Pada gilirannya, masyarakat penerima program hanya dapat diam tanpa berani melakukan kritik. Apalagi struktur sosial politik masyarakat cenderung paternalistik, yang menempatkan pemimpin sebagai pemegang otoritas.
2. Struktur sebagai pelancar, apabila struktur tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara bebas, terbuka dan demokratis. Pada struktur sebagai pelancar perencanaan program kegiatan disusun dari bawah (*Bottom up*), sehingga di dalam pelaksanaan dan evaluasi program masyarakat partisipasi dapat terlibat secara langsung.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya yang tergolong miskin dan berpenghasilan rendah maka diupayakan suatu Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Program ini merupakan proyek yang kegiatannya di arahkan kepada usaha-usaha pembangunan yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan golongan masyarakat miskin. Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan tidak berbeda jauh dengan tujuan utama dari program JPS yang terdiri dari :

1. Memulihkan kecukupan pangan dan terjangkau oleh masyarakat miskin.
2. Menciptakan kesempatan kerja produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin.
3. Memulihkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat miskin.
4. Memulihkan kegiatan ekonomi rakyat.

Tujuan P2KP adalah membiayai kegiatan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat miskin di kelurahan dengan sasaran melalui :

1. Bantuan modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan; dan
2. Hibah bagi pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud harus terselenggara secara partisipatif, baik dalam penyaringan maupun pelaksanaannya, serta bersifat transparan dan terbuka untuk diperiksa. Dalam jangka panjang, proyek/program ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin di perkotaan dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapinya dan memperbaiki kemampuan lembaga-lembaga lokal untuk membantu masyarakat miskin dimaksud. (Tim Persiapan P2KP, 1999, hal 1-2).

Sebagai suatu program pembangunan, dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan program tersebut. Kegagalan pelaksanaan program pembangunan seringkali disebabkan ketidaksesuaian antara program yang direncanakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat penerima program. Demikian pula halnya P2KP yang menggunakan dana bantuan luar negeri dan dikembangkan dalam bentuk simpan pinjam belum mampu meningkatkan produktivitas resipien yang menjadi sasaran pelaksanaan program. (Suara Merdeka, Juli, 2001). Kegagalan berbagai program pembangunan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara mereka yang dibantu dengan program yang direncanakan pemerintah seperti pendapat yang dikemukakan David C. Korten dan Sjahrir (1991, hal. 240) dalam salah satu teorinya :

“Daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu dengan program dan organisasi yang membantu. Dengan istilah yang lebih khusus, program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program; persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu “.

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa masyarakat penerima bantuan akan berusaha melaksanakan program tersebut jika program itu akan memberi manfaat dan sesuai dengan keinginannya.

Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan atau kegagalan implementasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan, maka penulis

akan meneliti dengan judul “Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal “.

1.2. Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan masyarakat banyak disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, organisasi dan manajemen. Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah masyarakat miskin yang menjadi obyek pembangunan. Keterbatasan kemampuan masyarakat miskin baik di bidang sosial ekonomi, pendidikan maupun budaya kehidupan menyebabkan timbulnya kesulitan untuk mengadopsi program-program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Secara organisasi pelaksana proyek (pemerintah) juga tidak menguasai karakteristik obyek. Sedang dari sudut manajemen (tata laksana) program masih kurangnya sikap pro aktif petugas lapangan baik pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat di dalam melakukan pembinaan.

Dari uraian di atas maka permasalahan dalam “Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal” dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungan status sosial ekonomi dengan efektivitas P2KP ?
2. Apakah ada hubungan kepemimpinan dengan efektivitas P2KP ?
3. Apakah ada hubungan komunikasi dengan efektivitas P2KP ?
4. Apakah ada hubungan status sosial ekonomi, kepemimpinan, dan komunikasi dengan efektivitas P2KP ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan status sosial ekonomi dengan efektivitas P2KP.
2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan kepemimpinan dengan efektivitas P2KP.
3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan komunikasi dengan efektivitas P2KP.
4. Untuk mengetahui apakah ada hubungan status sosial ekonomi, kepemimpinan, dan komunikasi dengan efektivitas P2KP.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian tentang Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang merupakan kajian ilmiah dan aplikasi ilmu pengetahuan diharapkan dapat menjadi wacana bagi penelitian berikutnya terutama penelitian implementasi kebijakan publik yang merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat.

2. Kegunaan akademis

Diharapkan hasil penelitian dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan program pascasarjana Magister Administrasi khususnya Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.

3. Kegunaan masyarakat atau pemerintah

Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah di dalam mengevaluasi program-program pemerintah yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan miskin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

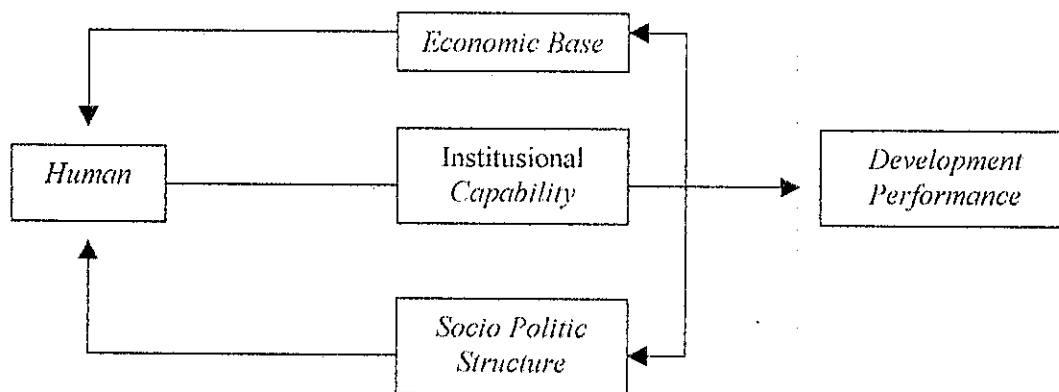
2.1. Landasan Teori

Sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah penelitian tentang Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dimana variabel-variabel yang akan diteliti diuraikan berdasarkan beberapa disiplin ilmu dan pendapat ahli. Mengingat masih kompleksnya kondisi masyarakat resipien dengan segala latar belakangnya dan adanya faktor-faktor lain yang dapat menentukan daya kerja maupun keberhasilan P2KP, maka untuk keperluan penelitian digunakan teori dasar yang dikemukakan G. Shabbir Cheema (1990, hal. 8) bahwa *development performance* itu dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel atau faktor yaitu :

- *Economic Base*
- *Institutional Capability*
- *Human Factor*
- *Socio Politic Structure*

Adapun secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 : Development Performance



Development performance (penampilan pembangunan) dapat dilihat dari keberhasilan ataupun kegagalan menyelenggarakan pembangunan dalam berbagai program. Karena pada hakekatnya program merupakan alat untuk mengatasi masalah tertentu dalam pembangunan. Sehingga berdasarkan pendapat G. Shabbir Cheema, maka ketiga variabel tersebut dapat digolongkan *human factor*, *economic base* dan *institusional capability*. *Human factor* menurut Shabbir Cheema meliputi segala sesuatu yang dimiliki individu seperti kemampuan, penampilan, sikap, nilai-nilai, kepercayaan, motivasi dan sebagainya. Untuk variabel *economic base* adalah kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh individu seperti kemampuan pendidikan, persepsi, kemampuan ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat baik pelaksana program maupun penerima program termasuk dalam variabel *institusional capability*.

Sesuai dengan variabel yang akan diteliti maka secara sistematis diuraikan sebagai berikut :

1. Konsep Status Sosial Ekonomi

Hal yang menyangkut dan menentukan efektivitas P2KP salah satunya adalah status sosial ekonomi dari masing-masing individu penerima/pelaksana P2KP tersebut. Hal ini penting karena seseorang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi maupun rendah akan mempengaruhi segala keaktifan-aktifannya dalam segala kegiatan pembangunan.

Adapun pengertian-pengertian yang berhubungan dengan status sosial ekonomi secara sistematis akan diuraikan dalam uraian berikut namun terlebih dahulu akan diuraikan satu persatu pengertian dari status sosial dan ekonomi. Patirim A. Sorokin mengatakan bahwa sistem berlapis-lapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga itu dalam jumlah banyak, dianggap oleh masyarakat berkedudukan dalam lapisan atas. Mereka yang hanya sedikit sekali atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga tersebut, dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. (Soerjono Soekanto, 1992, hal. 219)

Unsur-unsur yang mewujudkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat diantaranya adalah status atau kedudukan. Definisi atau pengertian dari status banyak diberikan oleh para ahli, antara lain :

a. H. Laurence Rose

“Bahwa status merupakan kedudukan seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari individunya jadi status merupakan kedudukan obyektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi“. (Dr. Phil. Astrid S. Sutanto, 1991, hal. 75)

b. Soerjono Soekanto (1992, hal. 233)

“Status atau kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya didalam kelompok yang lebih besar”.

c. Drs. Ismangun (1991, hal. 140)

“Status adalah keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang di dalam pola-pola kelakuan secara timbal balik antara individu dengan kelompok di dalam masyarakat, baik kedudukan yang diwariskan maupun kedudukan yang diusahakan”.

d. Roucek dan Warren (1994, hal. 34)

“Sebagai kedudukan seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan anggota lain dalam kelompok itu atau kedudukan

suatu kelompok berbanding dengan kelompok lain yang lebih banyak jumlahnya”.

Selanjutnya Ralph Linton mengenalkan dua jenis status yaitu : (1) *Ascribed* status dan (2) *Achieved* status. *Ascribed* status ini merupakan jenis status yang diperoleh berdasarkan wewenang atau kekuasaan resmi dan ini ada pada masyarakat tradisional. Sebaliknya *Achieved* status merupakan status yang dicapai seseorang oleh karena ia memenuhi beberapa syarat berdasarkan keberhasilannya. Terutama dalam masyarakat modern, makin diperlukan kecakapan dan pendidikan. Dan sekarang terjadilah pergeseran dari jenis *Ascribed* status ke jenis *Achieved* status.

Astrid Susanto (1991, hal. 79) menyimpulkan mengenai masalah status ini, bahwa status adalah konsep perbandingan peranan dalam masyarakat, status merupakan pencerminan dari hak dan kewajiban dalam tindakan manusia. Status apabila diperhatikan oleh masing-masing anggotanya akan menghasilkan pembentukan norma dalam masyarakat. Status mengadakan standarisasi hubungan anggota kelompok secara vertikal maupun horisontal dalam status masyarakatnya.

Dari beberapa uraian pengertian status di atas maka dapat dikatakan bahwa status merupakan posisi atau kedudukan seseorang individu dalam

suatu kelompok atau masyarakat sehubungan dengan sesuatu yang dimilikinya.

Status sebagai unsur baku dalam sistem berlapis-lapis, juga mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial masyarakat. Yang diartikan sebagai sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antar individu dalam masyarakatnya dan tingkah laku individu-individu tersebut. Dalam hubungan timbal balik tersebut status atau kedudukan mempunyai peranan dan arti penting. (Soerjono Soekanto, 1992, hal. 233)

Dengan demikian pengertian sosial berkenaan juga dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses sosial, karena sosial juga merupakan wadah terjadinya proses interaksi sosial tersebut. Drs. Soelaiman Joesoef dan Drs. Slamet Santoso (1991, hal. 67), sosial berkenaan dengan kehidupan manusia sebagai anggota suatu kelompok. Sedangkan istilah sosial pada departemen sosial artinya kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan. (Soerjono Soekanto, 1992, hal. 12)

Selanjutnya yang dimaksud dengan status sosial, menurut Soerjono Soekanto (1992, hal. 233) adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya..

Demikian manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, dimana dalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan individu-individu lain dalam suatu masyarakat. Oleh karena itulah seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu akan terjadi pusat perhatian, begitu pula dengan masyarakat miskin di pedesaan.

Peningkatan atau pergerakan status sosial menurut Ralph H. Turner dapat melalui mobilitas sosial, dimana khususnya melalui pendidikan dan ketrampilan orang mudah mengalami mobilitas ke atas. (Astrid Susanto, 1991, hal. 91). Mobilitas sosial merupakan suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi dari suatu kelompok sosial.

Selain status sosial, peningkatannya juga didukung oleh kemampuan ekonominya dalam usaha mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Menurut Ero H. Rosyidi (1995, hal. 136), ekonomi berkenaan dengan cara dan usaha bagaimana mencapai kemakmuran, baik perorangan maupun bersama, berkenaan dengan fenomena ongkos dan harga tabungan dan penanaman modal, penawaran dan permintaan. Ditambahkan oleh Ruslan H. Prawiro (1995, hal. 136) bahwa ekonomi adalah usaha manusia dalam kegiatannya memenuhi kebutuhan hidup.

Berikut ini akan dikemukakan mengenai masalah status sosial ekonomi itu sendiri. John Maynard Keynes mengemukakan bahwa status

sosial ekonomi dapat diukur dari tingkat pendapatan, tabungan, tingkat konsumsi serta investasi. (Ero H. Rosyidi, 1995, hal. 2). Kemudian Keynes dan Arthur Lewis selanjutnya mengatakan bahwa tingkat ekonomi dapat diukur melalui tingkat pendapatan, tabungan, tingkat konsumsi, tingkat investasi, produksi, distribusi. Dr. Melly G. Tan (1997, hal. 35) mengatakan, bahwa konsepsi status sosial ekonomi ialah konsep kedudukan sosial ekonomi seperti dalam ilmu pengetahuan masyarakat sudah lumrah mencakup : faktor tingkat pendidikan, faktor pekerjaan dan penghasilan. Dan pendapat yang lebih melengkapinya lagi adalah seperti yang dikemukakan oleh Joseph S. Roucek dan Roland L. Warren (1994, hal. 53), bahwa status sosial ekonomi dapat ditentukan oleh : jenis kegiatan ekonomi, jumlah pendapatan, jenis dan tingkat pendidikan, jenis tempat kediaman, jenis/kegiatan rekreasi, keanggotaan dalam berbagai persatuan, kedudukan ciri klas sosial suatu keluarga.

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka berkaitan dengan masalah Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dapat dirumuskan sebagai berikut : yang dimaksud dengan status sosial resipien dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang memiliki atau berlatar belakang tingkat pendidikan relatif rendah, berpendapatan rendah, kekayaan yang dimiliki rendah dan

tanggung keluarga cukup besar. Atau dengan kata lain berdasarkan dari beberapa definisi tersebut di atas maka konsep status sosial ekonomi akan ditelaah dari tingkat pendidikan, pendapatan, kekayaan dan tanggungan keluarga.

Pendidikan secara umum dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dapat membuat seseorang yang kurang tahu menjadi tahu atau lebih tahu, kurang terampil menjadi lebih terampil, dari sikap nrimo menjadi sikap yang lebih kritis, kreatif dan aktif dalam pembangunan masyarakat. Pendidikan oleh Muri Yusuf (1992, hal. 21) dikatakan sebagai suatu proses, baik berupa pemindahan maupun penyempurnaan dan oleh Ki Hajar Dewantoro dikemukakan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk mewujudkan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt) dan jasmani anak. Maksudnya supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak selaras dengan alam dan masyarakat. (Drs. Suwarno, 1992, hal. 3)

Ukuran dari pendidikan ini akan digunakan pendapat dari Coomb. Coomb mengemukakan bahwa pendidikan dapat meliputi tiga bentuk yaitu :

- a. Pendidikan formal ialah yang dikenal dengan pendidikan sekolah yang teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat.

- b. Pendidikan non formal ialah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terikat pada peraturan-peraturan yang tetap dan ketat (kursus, latihan)
- c. Pendidikan informal ialah yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seseorang lahir sampai mati di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari. (Soelaiman Joesoef dan Slamet Santoso, 1997, hal. 15)

Pendapatan sebagai salah satu ukuran status sosial ekonomi, menurut Biro Pusat Statistik dikelompokkan dalam pendapatan sektor formal, informasi dan subsistem. Pendapatan sektor formal adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari sektor formal atau dari pekerjaan pokok. Pendapatan informal adalah penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan. Sub sistem ialah penghasilan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang. (Mulyanto Sumardi dan Hans Lieters Evers, 1991, hal. 152) sedangkan pendapatan rumah tangga sebulan diperoleh dengan cara menjumlahkan setiap anggota rumah tangga. Pendapatan ini berasal dari beberapa sumber yaitu pendapatan dari pertanian dari pekerjaan utama maupun tambahan dari pertanian, usaha sewa rumah atau kontrak, sewa tanah, buruh, penerimaan

pensiun penerimaan yang berasal dari transfer dan penerimaan dari rumah tangga.

Pendapatan menurut pendekatan ekonomi makro bahwa pendapatan ialah penjumlahan antara pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan investasi. Sedangkan sisi pendapatan sesudah dikurangi dengan seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan tabungan rumah tangga. (Dr. Soedibiyono R, MBA, 1991, hal. 152)

Kekayaan sebagai ukuran dari status sosial ekonomi disini dimaksudkan sebagai apa saja yang dimiliki oleh masyarakat atau seseorang sehubungan dengan keadaan ekonominya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau mencapai tingkat kemakmuran tertentu. Begitu pula dengan tabungan sebagai investasi dapat merupakan kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggungan keluarga disini adalah seluruh jumlah jiwa yang harus dibiayai hidupnya, baik anak-anaknya maupun keluarga yang lain masih menjadi tanggungannya (baik famili maupun bukan famili).

2. Konsep Kepemimpinan

Menurut Gary Dessler bahwa pada dasarnya kepemimpinan itu menampakkan wujudnya apabila seseorang itu dapat mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan tertentu. Beliau berpendapat berikut ini :

“Leadership occurs whenever one person influences another to work toward some predetermined objective” (Fred Kerlinger, 1997, hal. 174)

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat utama pemimpin ialah harus dapat mempengaruhi orang lain (para bawahannya) agar bawahan dapat bekerja sama dan dapat mencapai hubungan yang baik, dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

Hubungan antara atasan dan bawahan, menurut G.R. Terry kepemimpinan mencakup arti :

1. Skill untuk memberi arah, menunjukkan jalan seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk membina orang-orang, untuk menunjukkan alat-alat yang tepat guna mencapai hasil.
2. Kemampuan untuk mencapai kerjasama dan loyalitas. Pemimpin berkemauan untuk mengusahakan agar orang bekerjasama dan bekerja ke arah tujuan yang sama.
3. Keberanian untuk bekerja sama terus sampai tugas yang diberikan selesai. (Fred Kerlinger, 1997, hal. 174 - 175)

Selanjutnya James M. Block mengemukakan tentang pengertian kepemimpinan sebagai berikut :

“Leadership capable of persuading others to work together under their direction as team to accomplish certain designated objective”

(Fred Kerlinger, 1997, hal. 175)

Berkaitan dengan masalah kepemimpinan ini ada masalah yang perlu dikemukakan, yaitu masalah teknik kepemimpinan. Menurut Arifin Abdul Tahman teknik kepemimpinan itu dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Teknik kepemimpinan pokok ialah teknik kepemimpinan sebagai dasar yang dapat digunakan pada segala macam teknik kepemimpinan, teknik ini terdiri dari :
 - a. Teknik menyiapkan orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut.
 - b. Teknik human relation
 - c. Teknik menjadi teladan
2. Teknik kepemimpinan khusus, ialah teknik kepemimpinan untuk menggerakkan orang-orang supaya suka dan dapat bekerja. Teknik ini terdiri dari :
 - a. Teknik persuasi dan memberi perintah
 - b. Teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok
 - c. Teknik memberi fasilitas.

Dalam kaitannya untuk kesuksesan pemimpin, Keith Davis merumuskan empat sifat umum yang nampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi :

1. Kecerdasan

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin. Namun demikian, yang sangat menarik dari penelitian tersebut ialah pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya.

2. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial

Pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas sosial. Dia mempunyai keinginan menghargai dan dihargai.

3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi

Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Mereka bekerja berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik dibandingkan dari ekstrinsik.

4. Sikap hubungan kemanusiaan

Para pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya. Dalam istilah penelitian di Universitas Ohio, pemimpin itu mempunyai perhatian dan kalau mengikuti istilah penemuan Michigan, pemimpin itu berorientasi pada karyawannya bukan berorientasi pada produksi. (Fred Kerlinger, 1997, hal. 176)

Berikut ini akan diuraikan, bagaimana faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap faktor semangat kerja dimana partisipasi masyarakat terlihat dalam suatu program.

A.A. Gondokusumo mengemukakan pendapatnya tentang hubungan kepemimpinan dengan semangat kerja, yaitu :

“Semangat kerja atau moril adalah releksi dari sikap kelompok terhadap kerja dan kerjasama. Seperti sikap pada setiap karyawan, semangat juga sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas dari pihak pimpinan, terutama oleh kebijaksanaan kepemimpinan. Semangat merupakan pengaruh utama pada sumbangan karyawan, membuat karyawan mencapai hasil yang tinggi”.

Dari pendapat di atas dapat terlihat bahwa pimpinan itu dapat mempengaruhi semangat kerja. Dalam membahas kaitan antara kepemimpinan dengan semangat kerja, penyusun juga mengutip pendapat Ralp Currier dan Alan C. Filley yang isi pendapatnya adalah sebagai berikut :

“The basis of morale building in the process of integrating interest. Much has already been said of the various wants and group and of the factory which govern succesful executive leadership. Good leadership must harmonice the needs of group which contribute values to and draw values from the organization. Good leadership must motivate subordinates to ward states goals. Thus, good morale is ultimately a result of succesful executive leadership”. (Fred Kerlinger, 1997, hal. 176-177)

Dalam membahas masalah kepemimpinan, apalagi dalam kaitannya dengan semangat kerja, maka tidak bisa dilupakan masalah gaya kepemimpinan. Likert merancang empat gaya kepemimpinan, yaitu :

1. *Gaya exploitive authoritative*

Manajer dalam hal ini sangat otokratis, mempunyai sedikit kepercayaan kepada bawahannya. Suka mengeksploitasi bawahan dan bersikap paternalistik.

2. *Gaya otokratis yang baik (benevolent authoritative)*

Pemimpin atau manajer yang termasuk dalam sistem ini mempunyai kepercayaan terselubung percaya pada bawahan.

3. *Gaya manajer konsultatif*

Manajer dalam hal ini sedikit kepercayaannya pada bawahan biasanya dalam hal kalau ia membutuhkan informasi, ide atau pendapat bawahan dan masih menginginkan melakukan pengendalian atas keputusan-keputusan yang dibuatnya.

4. *Gaya kelompok partisipatif (participatif group)*

Dalam hal ini manajer mempunyai kepercayaan terhadap bawahannya. Dalam setiap persoalan selalu mengandalkan untuk mendapatkan ide-ide atau pendapat-pendapat lainnya dari bawahan dan mempunyai niatan untuk mempergunakan bawahan secara konstruktif. (Fred Kerlinger, 1997, hal. 177)

Dari studi Likert tentang *leadership style*, Gary Dessler memberikan kesimpulannya dalam kaitan dengan semangat kerja, yang intinya dikatakan oleh Gary Dessler bahwa model kepemimpinan yang berorientasi pada

bawahan/pegawai akan meningkatkan semangat kerja pegawai. Adapun kesimpulan lengkapnya adalah sebagai berikut :

....., the seems little doubt that considerate, employee centered, supportive leadership usually leads to higher employee morale. In the other words leader who support the individuality of their subordinates and who treat these people as valued, important individuals, have subordinates who are more satisfied with work, as might be expected.

(Fred Kerlinger, 1997, hal. 177)

Jadi dapat disimpulkan bahwa timbulnya moril atau semangat kerja, merupakan syarat utama untuk tercapainya tujuan organisasi, tumbuhnya semangat kerja yang tinggi tergantung juga apakah pimpinan memenuhi persyaratan sebagai pimpinan yang baik.

George D. Halsey mengemukakan tentang sifat-sifat pemimpin yang baik yaitu :

1. Harus mempunyai kecerdasan (*throroughness*)
2. Harus bersifat adil (*fairness*)
3. Memiliki daya usaha atau kesanggupan memikul tanggung jawab
4. Harus bijaksana
5. Mempunyai kegairahan (*enthusiasm*)
6. Harus dapat mengendalikan perasaan (*emotional control*). (Fred Kerlinger, 1997, hal. 178)

Selanjutnya Buchori Zainun mengemukakan syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin untuk berhasil dalam memimpin suatu organisasi, yaitu :

1. Mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan mencari cara-cara pemecahan setiap persoalan yang timbul dengan cara yang tepat, bijaksana serta mengandung kelengkapan, dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk dilaksanakan.
2. Mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang-ambingkan oleh perusahaan suasana yang senantiasa berganti-ganti dan memisahkan antara mana yang soal pribadi, soal rumah tangga dan mana soal organisasi.
3. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan mampu membuat bawahan merasa betah, senang, dan puas di dalam pekerjaan.
4. Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan bawahan secara bijaksana dalam mewujudkan tujuan organisasi serta mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab dan wewenang akan didelegasikan. (Fred Kerlinger, 1997, hal. 176)

Dengan pendapat yang hampir bersamaan dengan pendapat di atas John D. Millet, mengemukakan empat syarat kepemimpinan dalam manajemen yaitu :

1. *The ability to see an enterprise as a whole*
2. *The ability to make decisions*
3. *The ability to delegate authority*
4. *The ability to command loyalty.* (Fred Kerlinger, 1997, hal. 178)

Pimpinan dalam melaksanakan kepemimpinan harus memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibanding dengan kecerdasan bawahan yang dipimpinnya, mampu mengambil keputusan yang cepat dalam menghadapi problematik yang muncul dalam pelaksanaan P2KP.

Kepemimpinan dalam penelitian ini diperlakukan sebagai variabel bebas. Dengan indikator-indikator perilaku pimpinan P2KP, yang dapat berwujud sikap dan perilaku Kepala Desa maupun aparat desa yang bertanggung jawab pada pelaksanaan dan keberhasilan P2KP serta penanggungjawab dan pelaksana tingkat propinsi dengan seluruh hirarkinya (BAPEDA).

Dari teori-teori kepemimpinan, teknik-teknik kepemimpinan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah penyusun memaparkan beberapa indikator dari kepemimpinan yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini yaitu :

- Tinggi rendahnya tingkat komunikasi antara pimpinan dengan bawahannya.

- Tinggi rendahnya tingkat kepercayaan atasan dalam mendelegasikan wewenang dan tugas kepada bawahannya.
- Kesiediaan pihak atasan memberikan bimbingan, pengarahan atau contoh-contoh kepada bawahan.
- Tinggi rendahnya tingkat kreatifitas pimpinan menciptakan suasana lingkungan kerja yang baik.

3. Efektivitas Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Wilayah Kecamatan

Sebelum membahas tentang efektivitas program proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan di wilayah Kecamatan kiranya perlu memahami pengertian efektivitas itu sendiri. Sebenarnya efektivitas disini penulis maksudkan sebagai keberhasilan. Keberhasilan berasal dari kata berhasil, yang dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai *effective*. Sehingga keberhasilan dapat diterjemahkan sebagai *effectiveness* atau efektivitas (JM. Echols dan Hasan S, 1992, hal. 207). Dengan demikian jelaslah bahwa efektivitas bisa disebut juga sebagai keberhasilan.

Selanjutnya menurut Richard M. Steers, efektivitas dapat diartikan sebagai berikut : sejauhmana organisasi dapat melaksanakan tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. Atau dengan kata lain,

efektivitas adalah suatu kondisi dimana hasil kegiatan yang telah dicapai sesuatu dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan Taliziduhu Ndraha (1992, hal. 110) mengkaitkan keberhasilan ini dalam pembangunan desa dengan mengemukakan indikator keberhasilan pembangunan desa yaitu :

1. Sejauhmana kondisi dan taraf hidup masyarakat berhasil diperbaiki dan ditingkatkan.
2. Sejauhmana pertisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya berhasil digerakkan
3. Sejauhmana kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berhasil ditumbuhkan.

Namun demikian sebagai kepentingan penelitian ini, maka ukuran keberhasilan dari program proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kecamatan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Taliziduhu Ndraha, yaitu tercapainya hasil-hasil yang diinginkan baik secara fisik maupun psychis yang berupa perubahan perilaku dan sikap masyarakat.

Keberhasilan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keberhasilan P2KP. Keberhasilan tersebut meliputi 2 (dua) aspek yaitu secara fisik yang ditandai dengan keberhasilan pelaksanaan P2KP dan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat resipien. Keberhasilan secara

psikis ditandai dengan adanya perubahan sikap masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli tentang sikap itu yaitu :

- a. Menurut W.A. Gerungan (1998, hal. 151)

Pengertian attitude itu dapat kita terjemahkan dengan kata sikap terhadap suatu obyek tertentu yang dapat merubah sikap, pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek tadi.

- b. Menurut David L. Loundon dan Albert J. Della (1998, hal. 506)

Sikap adalah suatu evaluasi yang berlangsung terus menerus dari proses yang bersifat motivasional, emosional, perseptual dan kognitif berkenaan dengan beberapa aspek dari dalam diri seseorang.

Dari definisi-definisi di atas maka sikap masyarakat pada dasarnya dibentuk oleh komponen kognitif, efeksi atau emosional dan kecenderungan perilaku yang berhubungan dengan apa yang dikehendaki.

Hal tersebut dapat disebutkan ukuran-ukurannya sebagai berikut :

1. Sejauhmana kondisi dan kesejahteraan masyarakat meningkat atau berubah.
2. Sejauhmana sikap mental masyarakat berubah
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat digerakkan.

4. Kemampuan masyarakat resipien untuk berkembang telah tumbuh.
5. Adanya rasa tanggung jawab dan keserasian lingkungan.
6. Hasil fisik proyek P2KP

4. Komunikasi

Hal yang tidak kalah pentingnya di dalam menilai suatu program pembangunan masyarakat ialah bagaimana komunikasi diselenggarakan diantara pelaku-pelaku program. Pola organisasi harus memberi kemungkinan komunikasi dalam empat arah yang berbeda-beda, yaitu :

- a. Komunikasi bawah, yang mengalir dari orang pada jenjang hirarki yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah. Bentuk yang paling umum dari komunikasi bawah berupa intruksi, memo resmi, pedoman kerja dan lain sebagainya.
- b. Komunikasi atas, yaitu penyampaian saran, usulan, maupun laporan dari hirarki bawah ke jenjang atasnya.
- c. Komunikasi horisontal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berada pada tataran yang sama. Misalnya antar bagian maupun antar individu dalam satu bagian.
- d. Komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antara pelaksana program dengan penerima program terutama di dalam menerjemahkan program-program pembangunan.

Proses komunikasi memungkinkan pimpinan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka memberikan informasi kepada pelaksana maupun kepada penerima program. Menurut T. Hani Handoko (1990, hal. 273) proses komunikasi dilakukan oleh orang dengan latar belakang yang heterogen yang lengkapnya pendapat tersebut berbunyi :

“Orang-orang, bukan organisasi, yang berkomunikasi !. Oleh karena itu suatu sistem komunikasi organisasi mencerminkan berbagai macam individu dengan latar belakang, pendidikan, kepercayaan, kebudayaan, keadaan jiwa, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tetapi bila individu-individu dalam organisasi berkomunikasi, apa yang diperbuat ? berikut ini akan dibahas model komunikasi dasar agar dapat dipahami mengapa komunikasi sering gagal dan kegiatan-kegiatan yang perlu diambil manajer untuk meningkatkan efektivitas komunikasi.”

Pentingnya komunikasi di dalam melaksanakan program kemasyarakatan dapat didasarkan pada teori yang diungkapkan oleh Denis McQuail (1987, hal. 90) yang menyatakan bahwa teori komunikasi massa berpangkal dari pandangan bahwa para anggota masyarakat tidak terintegrasi, atau setidaknya tidak terintegrasi secara “sehat”. Menurut Kornhauser (1968) sebenarnya banyak anggota masyarakat, yang tidak diorganisasi secara baik dan tidak pula berperan serta sepenuhnya, menghendaki adanya upaya para pemimpin untuk memobilisasi dan mengorganisasi mereka. Inti konsep massa yang sebenarnya mengandung dimensi nonintegrasi, tidak saling kenal mengenal satu sama lain, dan diorganisasi secara serampangan. C.W. Mills (1951, 1956) juga

menunjukkan keruntuhan konsep publik teori demokrasi klasik dan konsep penggantinya dengan cara menonjolkan makna kumpulan orang yang tidak mampu merumuskan atau menyadari tujuan langkah-langkah politiknya sendiri.

Berpijak dari teori di atas dimana masyarakat tidak terintegrasi secara baik maka komunikasi antara pelaksana P2KP dan penerima P2KP perlu adanya suatu komunikasi yang baik dalam rangka mengintegrasikan P2KP.

2.2. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian tentang program-program pembangunan terutama yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sudah banyak dilakukan. Antara lain dilihat dari hasil seminar nasional tekanan penduduk dan perubahan sosial ekonomi di pedesaan Jawa yang dilakukan oleh Universitas Nasional Australia (ANU) dan P3PK – UGM. (8 – 11 Juli 1985). (Mubyarto dan Ari Basuki, 1989, hal. 23)

Penelitian tentang perubahan sosial ekonomi di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini adalah proyek kerjasama antara P3PK UGM dengan Universitas Nasional Australia (ANU). Proyek ini diadakan oleh karena perasaan kurang puas dengan pendekatan atau teori yang pernah diajukan para sarjana, baik Indonesia maupun asing, terhadap pola perubahan

sosial ekonomi di pedesaan Jawa yang biasanya bersifat kontemporer saja dan tidak memperhatikan latar belakang sejarah dari gejala-gejala yang diteliti.

Penelitian ini memilih enam kabupaten masing-masing Tegal, Grobogan, Kebumen, Purworejo (Jawa tengah), Kediri dan Jember (Jawa Timur). Dari laporan penelitian dengan pendekatan sosial ekonomi dan historis ini, dapat dilihat keenam kabupaten yang diteliti itu adanya keanekaragaman dalam susunan sosio-ekonomi dan pola reaksi masyarakat terhadap pertumbuhan jumlah penduduk. Diantara keenam kabupaten tersebut ada yang mobilitas penduduknya mencolok, terutama Purworejo dan Tegal; ada yang mobilitas penduduknya rendah sekali termasuk Grobogan yang tanahnya tidak subur; ada juga yang mobilitas penduduknya sedang, yaitu yang penduduknya kadang-kadang sebagian pergi ke luar daerah tetapi kemudian kembali ke kampung halaman.

Dapat disimpulkan dari laporan hasil penelitian itu bahwa yang paling penting bagi para pengambil keputusan adalah agar keanekaragaman seperti itu diperhatikan. Kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, yang berhasil adalah apabila kebijakan itu cocok dengan situasi di daerah mana kebijakan itu diterapkan. Keanekaragaman dalam kegiatan sosio-ekonomi di suatu daerah merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi nasional dan internasional. (Mubyarto dan Ari Basuki, 1989, hal. 24)

2. Penelitian pelaksanaan IDT di tiga desa yaitu Desa Sendang, Terjan, dan Tanjungsari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Dari hasil penelitian dapat diketahui kondisi desa yang perlu diperhatikan antara lain keadaan geografis desa, kemampuan dan ketrampilan masyarakat, tingkat sosial ekonomi dan adat istiadat masyarakat. perbedaan tingkat keberhasilan pelaksanaan program-program IDT antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Program Aneka Usaha Tani Terpadu dapat berhasil pada Desa Terjan, Desa Sendang, dan Desa Tanjungsari.
 - b. Program Intensifikasi hanya dapat berhasil baik pada Desa Terjan dan Desa Sendang.
 - c. Program Gaduhan Ternak hanya dapat berhasil baik pada Desa Tanjungsari saja, sedangkan pada dua desa lainnya banyak mengalami hambatan terutama dalam hal penyediaan pakan. (Skripsi, Apun Rudi Legowo, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 1995)

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan

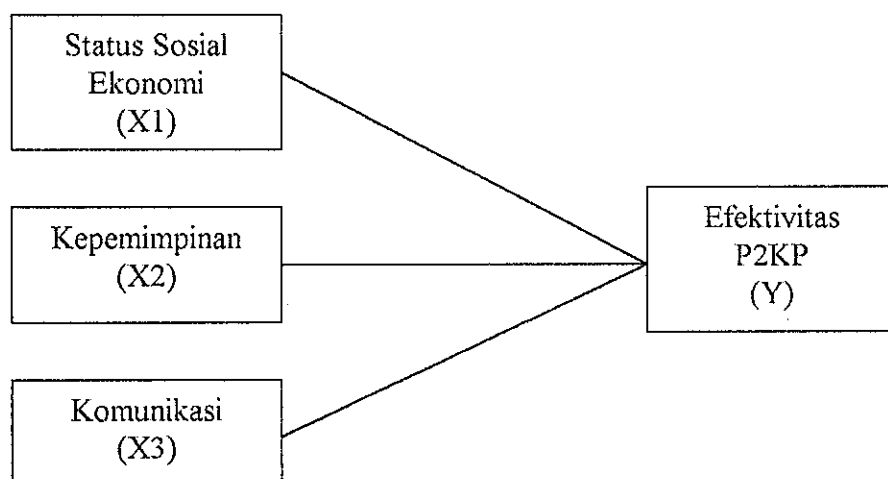
baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris. (Sugiyono, 2001, hal. 39)

Berdasarkan pendapat di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ada hubungan status sosial ekonomi dengan efektivitas P2KP.
2. Ada hubungan kepemimpinan dengan efektivitas P2KP.
3. Ada hubungan komunikasi dengan efektivitas P2KP.
4. Ada hubungan status sosial ekonomi, kepemimpinan, dan komunikasi, dengan efektivitas P2KP.

Dengan demikian dapat disusun secara grafis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat seperti di bawah ini :

Gambar 2 : Geometrik Hipotesis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Dengan latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah seperti tersebut di atas, maka tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian *explamantory* yang menurut Koentjoroningrat (1990, hal. 42) merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan sebab akibat berbagai variabel yang diteliti.

3.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan adalah merupakan penelitian bidang administrasi, dimana administrasi merupakan pranata sosial yang didalamnya terdapat berbagai disiplin ilmu yang saling berkaitan, misalnya sosiologi, psikologi, hukum, ekonomi, teknik, politik. Untuk itu sebenarnya ruang lingkup penelitian administrasi itu luas sekali. (Sugiyono, 2001, hal. 17). Dalam penelitian Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, merupakan penelitian kebijakan publik dimana P2KP dipandang sebagai suatu kebijakan pemerintah didalam memberikan pelayanan kepada publik yang dibatasi pada

pembuktian hipotesa. Efektivitas P2KP sebagai variabel dependen (terikat) akan diteliti sampai sejauhmana dipengaruhi oleh variabel-variabel independen (bebas) yang terdiri dari variabel status sosial ekonomi, kepemimpinan, dan komunikasi. Hasil penelitian akan diuji dengan menggunakan rumus-rumus statistik untuk mengukur validitas dan signifikansi antar variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan memilih lokasi di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dimana P2KP dilaksanakan. Pemilihan lokasi penelitian bersifat purposive dalam arti mampu menyelesaikan permasalahan untuk membuktikan hipotesa yang ada.

3.4. Variabel Penelitian

1. Klasifikasi Variabel

Dalam penelitian ini digunakan empat variabel yang diklasifikasikan sebagai variabel bebas berjumlah tiga variabel dan variabel terikat berjumlah satu variabel. Adapun variabel bebas maupun terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Variabel efektivitas sebagai variabel terikat
- b. Variabel status sosial ekonomi sebagai variabel bebas

- c. Variabel kepemimpinan sebagai variabel bebas.
- d. Variabel komunikasi sebagai variabel bebas.

2. Definisi Konseptual

a. Efektivitas P2KP

Adalah tercapainya hasil yang diinginkan baik secara fisik maupun psychis yang berupa perubahan sikap dan perilaku seseorang.

b. Status Sosial

Adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, pendapatan, kekayaan dan tanggungan keluarga.

c. Kepemimpinan

Adalah kemampuan dan ketrampilan seseorang memimpin, mengarahkan dan membina kelompok-kelompok orang sesuai dengan tujuan atau misi tertentu

d. Komunikasi

Adalah hubungan/interaksi antara dua atau lebih individu dengan menggunakan berbagai media komunikasi.

3. Definisi Operasional

Adapun variabel di dalam penelitian ini diukur dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Variabel Efektivitas (keberhasilan) P2KP diukur berdasarkan indikator :

- a. Pengembangan kegiatan usaha produktif
 - b. Pembukaan lapangan kerja baru
 - c. Kemampuan perorangan / keluarga
 - d. Keberhasilan kelembagaan masyarakat, kelurahan mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan P2KP.
2. Variabel Status Sosial Ekonomi diukur berdasarkan indikator :
- a. Pendidikan resipien
 - b. Tingkat pendapatan resipien
 - c. Tingkat pengeluaran resipien
 - d. Tanggungan keluarga resipien
3. Variabel Kepemimpinan diukur berdasarkan indikator :
- a. Efektivitas kepemimpinan petugas lapangan terhadap kelompok resipien
 - b. Tinggi rendahnya tingkat kepercayaan terhadap kelompok
 - c. Kesiediaan pimpinan memberi bimbingan
 - d. Tingkat kreativitas pimpinan pengurus kelompok sasaran.
4. Variabel Komunikasi diukur berdasarkan indikator :
- a. Komunikasi ke bawah, antara petugas lapangan dengan penerima program

- b. Komunikasi ke atas, antara penerima program dengan petugas lapangan
- c. Komunikasi horizontal, antara sesama penerima program dan/atau sesama petugas

Rincian dari operasional variabel-variabel di atas terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 : Operasional Penelitian

No	Variabel	Indikator	Daftar pertanyaan
1	Efektivitas P2KP	A. Pengembangan kegiatan usaha	Nomor 1 s/d 4
		B. Pembukaan lapangan kerja baru	Nomor 5 s/d 8
		C. Kemampuan perorangan / keluarga	Nomor 9 s/d 12
		D. Keberhasilan P2KP	Nomor 13 s/d 16
2	Status Sosial Ekonomi	A. Pendidikan	Nomor 17 s/d 20
		B. Tingkat pendapatan	Nomor 21 s/d 24
		C. Kekayaan responden	Nomor 25 s/d 28
		D. Tanggungan keluarga	Nomor 29 s/d 32

3	Kepemimpinan	A. Tinggi rendahnya tingkat kepercayaan	Nomor 33 s/d 36
		B. Kesiapan pimpinan memberi bimbingan	Nomor 37 s/d 40
		C. Tingkat kreativitas pimpinan	Nomor 41 s/d 44
4	Komunikasi	A. Komunikasi bawah	Nomor 45 s/d 48
		B. Komunikasi atas	Nomor 49 s/d 52
		C. Komunikasi horisontal	Nomor 53 s/d 56

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data sebagai bahan pembahasan, yakni :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian atau sample penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari responden yaitu Kepala Keluarga peserta P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, baik berupa dokumen, laporan dan segala catatan mengenai pelaksanaan P2KP.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa questioner berstruktur yaitu daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden secara bebas. Terdiri dari :

1. Daftar pertanyaan efektivitas (keberhasilan) P2KP
2. Daftar pertanyaan status sosial ekonomi
3. Daftar pertanyaan kepemimpinan
4. Daftar pertanyaan komunikasi

3.7. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek, subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. (Moh. Nazir, 1985, hal. 325). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh peserta P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Jumlah penduduk Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal 8675 orang. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 46 kelompok. Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi harus beranggota minimal tiga orang dari rumah tangga yang berbeda. Pendapatan per keluarga (jika beranggota empat orang) anggota KSM itu tidak boleh lebih dari Rp. 250.000,00 per bulan. Jadi minimal tiga orang anggota dari rumah tangga

yang berbeda kali 46 (empat puluh enam) KSM berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) anggota. Karena adanya ketentuan peserta P2KP ialah anggota masyarakat yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp. 250.000,- per bulan, maka responden diasumsikan homogen (tidak berstrata). Sehingga di dalam penentuan jumlah sampel digunakan teknik Random Sampling yaitu cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak, yakni dengan memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi semua anggota populasi untuk terpilih jadi anggota sampel tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen (Soegiyono, 2001, hal. 59). Jumlah sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang 100 % mewakili populasi adalah sama dengan populasinya, maka makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi semakin besar kesalahan generalisasi. (Soegiyono, 2001, hal. 63). Berdasarkan pendapat di atas maka sampel dalam penelitian ini ditentukan 43 % dari 138 yaitu 60 responden. Jumlah tersebut masih lebih besar dari penentuan jumlah sampel yang dikemukakan oleh Ida Bagoes Mantra bahwa besar sampel minimal 10 % dari populasi. (Ida Bagoes Mantra dan Kasto, 1995, hal. 149).

3.8. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan metode :

1. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian dilakukan langsung di obyek penelitian (Desa Cepiring) guna mengumpulkan data primer .

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung di obyek penelitian untuk melakukan pencatatan peristiwa-peristiwa yang ada berkaitan dengan obyek yang diteliti.
 - b. Wawancara/*Interview*, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pengarah (*interview guide*).
 - c. Angket atau daftar pertanyaan, yaitu pengumpulan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden untuk memperoleh jawaban. Daftar pertanyaan yang diberikan sudah dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban yang dapat dipilih dengan bebas oleh responden.
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan data pelengkap dari data primer. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur atau bacaan, dokumentasi maupun arsip-arsip program pelaksanaan P2KP baik di daerah penelitian maupun di daerah lain.

3. Pengukuran, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur validitas data hasil penelitian dalam meneliti dan menilai hasil penelitian digunakan jenjang penilaian sebagai berikut :
- Jawaban yang sangat mendukung diberi skor 4
 - Jawaban yang cukup mendukung diberi skor 3
 - Jawaban yang kurang mendukung diberi skor 2
 - Jawaban yang tidak mendukung diberi skor 1

3.9. Teknik Pengolahan Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul maka diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

a. Editing

Yaitu proses penyeleksian data untuk memisahkan mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Untuk data yang belum lengkap diusahakan untuk dilengkapi sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Sedang data yang tidak diperlukan akan dibuang.

b. Coding

Yaitu proses pemberian kode pada data sesuai dengan variabel yang akan dibahas sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran dan analisis yang dilakukan. Cara pemberian kode disesuaikan dengan variabel penelitian.

c. Tabulasi

Yaitu proses pembuatan tabel-tabel baik tabel frekuensi maupun tabel skor jawaban responden sehingga akan mempermudah dalam mengikuti laporan hasil penelitian.

3.10. Teknik Analisis Data

Analisa terhadap data dengan menggunakan 2 (dua) metode analisa, yaitu :

1. Analisa kualitatif

Analisa kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa postulat maupun pendapat responden yang bukan berupa data statistik. Analisa kualitatif yang berdasarkan pendapat responden, terlihat pada tabulasi prosentase jawaban responden (lihat halaman 68)

2. Analisa kuantitatif

Dilakukan terhadap data yang berupa data statistik untuk mencari tingkat korelasi antar variabel dengan menggunakan :

a. Koefisien Rank – Kendall

Metode ini pada dasarnya sama saja dengan metode Spearman sebelumnya, yaitu berusaha mengukur derajat keeratan hubungan antara suatu variabel terhadap variabel lainnya dimana asumsi daripada normalitas distribusinya dapat kita abaikan. Dalam metode Kendall, kita harus membuat ranking terlebih dahulu secara teratur pada satu

macam pengamatan tertentu kemudian barulah kita menyesuaikan ranking yang telah kita susun tersebut dengan pasangannya yang telah ada. (Samsubar Saleh, 1986, hal.105 - 106)

$$T = \frac{S}{\frac{1}{2} N (N - 1)}$$

dimana :

T = merupakan koefisien korelasi Kendall

N = jumlah pasangan observasi pasangan pengamatan

S = selisih antara nilai positif dan negatif terhadap masing-masing ranking yang diberikan.

b. Uji *Significant* (Samsubar Saleh, hal. 109-110)

Karena $N > 10$, maka distribusi dapat mendekati distribusi normal dimana memiliki mean : $(U_r) = 0$ dan standart deviasi

$$\alpha_r = \sqrt{\frac{2(2N + 5)}{9N(N - 1)}}$$

sehingga uji *significant* Kendall rank

$$Z_H = \frac{T - U_r}{\alpha_r}$$

Sedangkan nilai kritisnya pada α tertentu adalah $\pm Z_{1/2}$

(pengujian dengan 2 sisi), jadi :

H_0 diterima bila $- Z_{1/2} \alpha \leq Z_H \leq + Z_{1/2} \alpha$

H_0 ditolak bila $Z_H > + Z_{1/2} \alpha$ atau $Z_H < - Z_{1/2} \alpha$

- c. Untuk menghitung korelasi antara keempat variabel (variabel status sosial, kepemimpinan, komunikasi dan efektivitas P2KP) digunakan metode Kendall Koefisient of Concordance W. (Samsubar Saleh, 1986, hal. 116)

$$W = \frac{S}{1/12 k^2 (N^3 - N)}$$

dimana : $S = \sum \left(R_j - \frac{\sum R_j}{N} \right)^2$

S = menunjukkan jumlah deviasi kuadrat terhadap nilai
meannya (R_j)

k = jumlah set ranking

N = jumlah obyek yang diamati

H_0 diterima bila $S < S$ tabel

H_0 ditolak bila $S \geq S$ tabel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal merupakan wilayah desa/kelurahan, yang berada dalam wilayah pemerintahan terendah dalam struktur administrasi Kabupaten Kendal. Desa Cepiring berbatasan dengan wilayah desa lainnya sekecamatan Cepiring, yakni :

- Sebelah Utara Desa Damarsari
- Sebelah Timur Desa Kali Bodri
- Sebelah Selatan Desa Botomulyo
- Sebelah Barat Desa Karang Ayu

Tabel 2 : Luas Wilayah dan Peruntukannya Desa Cepiring Kecamatan Cepiring
Kabupaten Kendal

No	Peruntukan Lahan	Luas
1	Luas sawah	60,662 hektar
	a. Sawah beririgasi teknis	40 hektar
	b. Sawah beririgasi ½ teknis	20,662 hektar
2	Luas Perkarangan	76,483 hektar
	a. Permukiman umum	35,60 hektar
	b. Untuk bangunan	
	- Perkantoran	0,450 hektar
	- Sekolah	1,290 hektar
	- Pertokoan/perdagangan/pasar/ terminal	1,390 hektar
	- Tempat ibadah	0,345 hektar
3	Rekreasi dan Olah Raga	
	- Lapangan sepak bola	1,00 hektar
	- Lapangan bola voley/basket	0,100 hektar
4	Perkebunan	5,720 hektar
5	Kuburan/Makam	1,420 hektar
6	Jalan	4,170 hektar
Luas Desa Cepiring		153,645 hektar

Sumber : Data Dasar Profil Desa Cepiring Th. 2001

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa Desa Cepiring Kecamatan Cepiring termasuk desa pertanian dengan luas area sawah 60,662 hektar atau

$$\frac{60,662}{153,645} \times 100 \% = 39,48 \% \text{ luas desa.}$$

153,645

Jarak Desa Cepiring ke Ibukota Kecamatan Cepiring 0,5 km, jarak ke Ibukota Kabupaten 6 km dan jarak ke Ibukota Propinsi (Semarang) 36 km. Desa Cepiring mempunyai lahan dataran 153,645 hektar dengan klasifikasi kesuburan tanah 123,000 hektar dan tidak subur 30,645 hektar. Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal mempunyai curah hujan 2000 – 3000 M per tahun, sehingga pertanian di Desa Cepiring dapat dikatakan cukup maju.

Jumlah penduduk Desa Cepiring 8675 jiwa, jumlah Kepala Keluarga 2027 KK yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Berdasarkan Usia / Golongan Umur

No	Golongan Umur	Jumlah
1	0 - 12 bulan	153 jiwa
2	1 - 3 tahun	258 jiwa
3	4 - 5 tahun	156 jiwa
4	6 tahun	287 jiwa
5	7 tahun	256 jiwa
6	8 - 10 tahun	364 jiwa
7	11 - 13 tahun	468 jiwa
8	14 tahun	110 jiwa
9	15 tahun	126 jiwa
10	16 tahun	147 jiwa
11	17 - 20 tahun	1083 jiwa
12	21 - 25 tahun	1224 jiwa
13	26 - 30 tahun	955 jiwa
14	31 - 40 tahun	826 jiwa
15	41 - 49 tahun	850 jiwa
16	50 tahun	122 jiwa
17	51 - 55 tahun	455 jiwa
18	56 - 60 tahun	435 jiwa
19	61 - 70 tahun	225 jiwa
20	70 tahun keatas	175 jiwa
		8675 jiwa

Sumber : Data Dasar Profil Desa Cepiring Th. 2001

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui komposisi penduduk Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan melihat umur medianya dengan rumus :

$$Md = l_{Md} + \frac{N/2 - fx}{f_{Md}} \cdot i$$

dimana :

l_{Md} = batas bawah kelompok umur yang mengandung jumlah $N/2$

N = jumlah penduduk

fx = jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok yang mengandung nilai $N/2$

f_{Md} = jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat $N/2$

Jika digunakan kategori :

Umur	Kategori
- Kurang dari usia 20 tahun	- Penduduk Muda
- Antara usia 21 s/d 30 tahun	- Penduduk Inter Mediate
- Lebih dari usia 30 tahun	- Penduduk Tua

Maka menurut rumus tersebut :

$$N/2 = 8675 : 2 = 4337,5 = 4338$$

$$l_{Md} = 20$$

$$\begin{aligned}
 f_x &= 2628 \\
 f_{Md} &= 1412 \\
 Md &= 20 + \frac{4338 - 2628}{1412} \\
 &= 20 + 1,2 \\
 &= 21,2
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan ini dapat diidentifikasi bahwa penduduk di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal tergolong penduduk intermediate, tidak termasuk golongan muda, tetapi bukan pula golongan tua.

Untuk mengetahui tingkat ketergantungan penduduk terhadap penduduk potensial dapat dicari dengan metode atau rumus :

$$\frac{P(0 \text{ s/d } 14) + P(51 - 70 +)}{P(15 \text{ s/d } 50)} \times 100\%$$

Dimana :

$P(0 \text{ s/d } 14)$ = jumlah penduduk dari usia 0 sampai dengan 14 tahun

$P(65 +)$ = jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas.

$P(15 \text{ s/d } 60)$ = jumlah penduduk berusia 15 tahun sampai dengan berusia 64 tahun.

Tercatat data :

- Penduduk (0 s/d 14) = 2052 jiwa
 - Penduduk (51 - 70 +) = 1290 jiwa
 - Penduduk (15 s/d 50) = 5333 jiwa
-
- 8675 jiwa

Jadi :

$$\frac{P(0 - 14) + P(51 - 70 +)}{P(15 - 50)}$$

$$\frac{P(2052) + P(1290)}{P(5333)} \times 100\% = 62,6\%$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang produktif di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal menanggung 62,6 sampai 63 jiwa penduduk Desa Cepiring yang tidak produktif.

Dengan demikian dapat diasumsikan dari jumlah penduduk Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal 8675 jiwa yang mempunyai klasifikasi tergantung pada penduduk potensial produktif adalah :

$$\frac{8675}{100} \times 40 \text{ jiwa} = 3470 \text{ jiwa}$$

Dilihat dari mata pencaharian penduduk Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Sub sektor pertanian tanaman pangan	1154 jiwa
2	Sub sektor perkebunan	50 jiwa
3	Sub sektor peternakan	25 jiwa
4	Sub sektor perikanan / kenelayanan	23 jiwa
5	Sub sektor pertambangan / galian C	100 jiwa
6	Sub sektor industri kecil / kerajinan	87 jiwa
7	Sub sektor industri sedang / besar	827 jiwa
8	Sub sektor jasa perdagangan	
	1. Jasa pemerintahan / non pemerintahan	
	a. Pegawai Negeri Sipil	124 jiwa
	b. Pensiunan ABRI / Sipil	113 jiwa
	c. Pegawai Swasta	284 jiwa
	d. Pegawai BUMN / BUMD	367 jiwa
	e. Pensiunan Swasta	159 jiwa
	2. Jasa-jasa lembaga keuangan	
	a. Perbankan	14 jiwa
	b. Perkreditan Rakyat	88 jiwa
	c. Pegadaian	2 jiwa
	d. Asuransi	55 jiwa
	3. Jasa perdagangan	
	a. Pasar Desa / Kecamatan	579 jiwa

b. Warung	87 jiwa
c. Kios	49 jiwa
d. Toko	116 jiwa
4. Jasa komunikasi dan angkutan	
a. Angkutan tak bermotor	14 jiwa
b. Angkutan sepeda motor	9 jiwa
c. Mobil kendaraan umum	30 jiwa
5. Jasa pelayanan hukum dan nasihat	
a. Notaris	6 jiwa
6. Jasa ketrampilan	
a. Tukang kayu	12 jiwa
b. Tukang batu	126 jiwa
c. Tukang jahit	32 jiwa
d. Tukang cukur	6 jiwa
7. Jasa lainnya	
a. Listrik, gas dan air	4 jiwa
b. Jasa persewaan	7 jiwa

Sumber : Data Dasar Profil Desa Cepiring Th. 2001

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk yang terbesar adalah di sektor pertanian (1154 jiwa), jasa pemerintahan/non pemerintahan 1047 jiwa, jasa perdagangan 831 jiwa, dan sektor industri sedang / besar 827 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor non formal yaitu jasa perdagangan, industri kecil/besar dan pertanian.

Tabel 5 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Cepiring Kecamatan Cepiring
Kabupaten Kendal (5 Th. Keatas)

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademik / Perg. Tinggi	145
2	Tamat SLTA	1565
3	Tamat SLTP	1689
4	Tamat SD	2031
5	Tidak Tamat SD	113
6	Belum Tamat SD	1326
7	Tidak Sekolah	941
	Jumlah	7810

Sumber : Data Dasar Profil Desa Cepiring Th. 2001

Tabel di atas menunjukkan penduduk yang tidak sekolah dan tidak tamat Sekolah Dasar relatif cukup besar sejumlah 1054 jiwa atau kurang lebih 12,15 %. Tamat SLTA 1565 jiwa dan tamat akademik/perguruan tinggi 145 jiwa. Dari komposisi pendidikan ini maka dapat dikatakan penduduk Desa Cepiring dapat dikatakan mempunyai pendidikan yang cukup yaitu sebesar 19,71 %. Dengan demikian jika diperbandingkan dengan penduduk yang tidak berpendidikan, pendudukan Desa Cepiring yang berpotensi hanya sekitar 7,65 %. Hal ini perlu dikemukakan agar dapat mengetahui Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal di dalam melaksanakan program P2KP.

4.1.2. Data dan Interpretasi

Responden dalam penelitian ini sebanyak 60 orang yang diambil dari jumlah penduduk yang mengikuti Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yaitu kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang terdiri seperti tabel di bawah ini :

Tabel 6 : Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

No	Nama KSM	Jumlah Anggota
1	Sri Rejo	3
2	Maju Jaya	3
3	Makmur Jaya I	3
4	Makmur Jaya I	3
5	Bina Mandiri	3
6	Sejahtera I	3
7	Sejahtera II	3
8	Al-Kausar	3
9	Mulia	3
10	Langgeng	3
11	Manbau Rizky I	3
12	Manbau Rizki II	3
13	Makmur Bersama	3
14	Melati	3
15	Cendana	3
16	Harapan Maju	3
17	Lincak Bambu	3
18	Pelangi	3
19	Tirtosari	3
20	Mekarsari	3
21	Lintang Songo	3
22	Lancar	3
23	Pande Besi	3
24	Rizki	3
25	Suka Maju	3
26	Swakarya Bersama	3

27	Usaha Maju	3
28	Rejeki Langgeng	3
29	Mawar Harum	3
30	Barokah Jaya	3
31	Al-Amin	3
32	Anggrek	3
33	Rahayu	3
34	Setia Jaya	3
35	An-Nur	3
36	Rejeki Lancar	3
37	Sri Rejeki	3
38	Subur Makmur	3
39	Lestari	3
40	Berkah	3
41	Sidorukun	3
42	Tombo Ati	3
43	Sumber Rejeki	3
44	Al Barokah	3
45	Berkah Jaya	3
46	Millenium	3
Jumlah		138 anggota

Sumber : Data Dasar Profil Desa Cepiring Th. 2001

Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 46 kelompok. Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi harus beranggota minimal tiga orang dari rumah tangga yang berbeda. Pendapatan per keluarga (jika beranggota empat orang) anggota KSM itu tidak boleh lebih dari Rp. 250.000,00 per bulan. Jadi minimal tiga orang anggota dari rumah tangga yang berbeda kali 46 (empat puluh enam) KSM berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) anggota.

Dari populasi anggota KSM tersebut diambil 60 (enam puluh) responden atau $\frac{60}{138} \times 100\% = 43,48\%$.

138

Dari hasil penelitian diperoleh data sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel di bawah ini :

4.1.2.1. Identitas Responden

Tabel 7

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Responden	Prosentase
1	Laki-laki	39	65 %
2	Perempuan	21	35 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Data primer yang diolah

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa 65 % responden adalah laki-laki dan 35 % adalah wanita. Hal ini berarti sudah melibatkan faktor gender wanita dan laki-laki di dalam penelitian.

Tabel 8

Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Responden	Prosentase
1	20 – 30 Th	10	16,67 %
2	31 – 40 Th	23	38,33 %
3	41 – 50 Th	11	18,33 %
4	Lebih dari 50 Th	16	26,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Data primer yang diolah

Jumlah responden berdasarkan usia disajikan dalam tabel di atas. Responden berusia 20–30 th berjumlah 16,67 %, berusia 31-40 th berjumlah 38,

33 %, berusia 41-50 th berjumlah 18,33 % dan yang berusia lebih dari 50 th berjumlah 26,67 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden berdasarkan perhitungan usia produktif, semua responden tergolong dalam kategori masyarakat produktif.

Tabel 9

Jumlah Responden Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Responden	Prosentase
1	Penjahit	1	1,67 %
2	Pedagang	46	76,67 %
3	Bengkel	5	8,33 %
4	Peternakan	1	1,67 %
5	Rumah Tangga	2	3,33%
6	Swasta	3	5 %
7	Pengangguran	1	1,67 %
8	Jasa	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Data primer yang diolah

Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa responden terbesar bermata pencaharian sebagai pedagang (76,67 %). Sedang pengangguran hanya 1,67 % dan rumah tangga 3,33 %. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dilihat dari mata pencaharian peserta P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang tidak tepat sasaran hanya 5 % yaitu pengangguran 1,67 % ditambah rumah tangga 3,33 %. Sebab penggunaan dana P2KP berdasarkan ketentuan adalah kegiatan yang dapat dikembangkan seperti pertanian kota, pelatihan bagi kelompok, pembelian alat-alat kerja, dan bantuan kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.

4.1.2.2. Implementasi P2KP (Y)

Efektivitas P2KP yang merupakan variabel terikat diteliti dari indikator-indikator pengembangan kegiatan usaha, pembukaan lapangan kerja baru, kemampuan perorangan/keluarga dan keberhasilan P2KP. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada dasarnya setiap peserta program menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Seratus persen responden menyatakan mengikuti P2KP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini berarti P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sudah tepat sasaran. Dalam pelaksanaan P2KP dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang dipilih langsung oleh anggota dengan ketentuan minimal diikuti oleh 3 (tiga) keluarga sehingga di dalam menentukan program penanggulangan kemiskinan perkotaan sesuai dengan keadaan masyarakat peserta program. Pemilihan Kelompok Swadaya Masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10

Kelompok Swadaya Masyarakat Pilihan Responden

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat sesuai	37	61,67 %
2	Cukup sesuai	23	38,33 %
3	Ragu-ragu	0	0
4	Tidak sesuai	0	0
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 2

Tabel di atas menunjukkan data 61,67 % responden menyatakan sangat sesuai dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dipilih. Sedangkan 38,33 % responden, menyatakan cukup sesuai dengan pilihan Kelompok Swadaya Masyarakat yang diikutinya. Jawaban cukup sesuai dari responden dapat diinterpretasikan mempunyai dua kemungkinan, pertama keikutsertaan responden di dalam kelompok swadaya masyarakat hanya didasarkan penunjukkan, kedua keikutsertaan responden dalam KSM memang pilihan sendiri. Hal tersebut akan semakin jelas apabila dikaitkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11
Kebebasan Mengajukan Usul Atau Ide

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Merasa bebas	23	38,33 %
2	Bebas	32	53,33 %
3	Ragu-ragu	5	8,33 %
4	Tidak bebas	0	0
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 3

Pada Tabel 11 responden yang menyatakan bebas mengajukan usul atau ide 91,66 %, sedangkan yang ragu-ragu 8,33 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan memilih dan membentuk kelompok swadaya masyarakat 91,66 % pilihan responden sendiri.

Tabel 12
Kegiatan KSM Yang Sesuai Pilihan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat sesuai	10	16,67 %
2	Sesuai	3	5 %
3	Ragu-ragu	6	10 %
4	Tidak sesuai	38	63,33 %
5	Tidak menjawab	3	5 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 4

Kebebasan memilih dan membentuk kelompok swadaya masyarakat oleh responden ternyata tidak menjamin kebebasan di dalam memilih kegiatan kelompok swadaya masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 12 yang menyatakan bahwa kegiatan kelompok swadaya masyarakat yang sesuai dengan pilihan responden ternyata hanya 16,67 % yaitu yang menyatakan sangat sesuai, yang menyatakan sesuai 5 %. Sedang yang menyatakan kegiatan kelompok swadaya masyarakat tidak sesuai dengan pilihan responden 63,33 % kalau ditambah dengan yang menyatakan ragu-ragu atau tidak menjawab maka prosentase ketidaksesuaian kegiatan KSM dengan pilihan responden (anggota kelompok) menjadi sebesar 78,33 %. Pernyataan di atas dapat dijadikan indikator bahwa program yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan responden. Hal tersebut berarti akan berkenaan dengan apa yang dikemukakan oleh C. Korten bahwa daya kerja suatu program tergantung kepada kesesuaian keinginan penerima program. Kegiatan KSM yang tidak sesuai pilihan responden 63,33 % merupakan indikator bahwa pelaksanaan

P2KP di Desa Cepiring masih menggunakan sistem top down (ide datang dari atas) bukan keinginan penerima program (*bottom up*). Meskipun demikian, kendati P2KP 63,33 % tidak sesuai dengan pilihan responden tetapi responden tetap merasakan memperoleh keuntungan dengan mengikuti program penanggulangan kemiskinan perkotaan. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 13
Keuntungan Responden Mengikuti P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat memperoleh keuntungan	20	33,33 %
2	Memperoleh keuntungan	7	11,67 %
3	Cukup memperoleh keuntungan	32	53,33 %
4	Tidak memperoleh keuntungan	0	0
5	Tidak menjawab	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 5

Tabel di atas menyajikan data program yang dilaksanakan mendapat respon positif dari masyarakat resipien. Hampir seluruh responden menyatakan memperoleh keuntungan dengan mengikuti program penanggulangan kemiskinan perkotaan. Sedang tingkat kerugian yang dalam hal ini bukan kerugian materiil tetapi kerugian sistem yang digunakan P2KP dapat dilihat di Tabel 14.

Tabel 14
Kerugian Disebabkan P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Diselenggarakan tidak transparan	40	66,67 %
2	Transparan	5	8,33 %
3	Cukup transparan	8	13,33 %
4	Sangat transparan	6	10 %
5	Tidak menjawab	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 6

Tabel di atas menunjukkan data kurang terbukanya P2KP kepada anggota sehingga dianggap merugikan. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh 66,67 % responden yang menyatakan P2KP diselenggarakan tidak transparan sehingga merugikan responden, yang menyatakan cukup transparan hanya 13,33 %. Dari tabel ini juga dapat diketahui bahwa pada umumnya peserta P2KP menghendaki adanya keterbukaan dari semua aparat pelaksanaan baik tentang program-programnya maupun pembentukan kelompok swadaya masyarakat.

Tabel 15
Usaha Ekonomi Produktif Lebih Menguntungkan Masyarakat

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat menguntungkan	30	50 %
2	Menguntungkan	15	25 %
3	Cukup menguntungkan	13	21 %
4	Tidak menguntungkan	1	1,67 %
5	Tidak menjawab	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 7

P2KP untuk program usaha ekonomi produktif ternyata dianggap lebih menguntungkan oleh responden. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan

responden 50 % menyatakan sangat menguntungkan, 25 % menyatakan menguntungkan, dan 21 % menyatakan cukup menguntungkan.

Tabel 16

Penilaian Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat menguntungkan	24	40 %
2	Menguntungkan	27	45 %
3	Cukup menguntungkan	9	15 %
4	Tidak menguntungkan	0	0
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 8

Demikian pula pembangunan dan prasarana yang dilakukan P2KP dinilai masyarakat 40 % sangat menguntungkan, 45 % menguntungkan, dan 15 % cukup menguntungkan. Sehingga dapat dikatakan untuk P2KP hibah pembangunan prasarana dan sarana lingkungan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat.

Tabel 17

Peranan Anggota Dalam KSM/BKM

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat penting	6	10 %
2	Penting	8	13,33 %
3	Cukup penting	38	63,33 %
4	Tidak penting	8	13,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 9

Bagaimana persepsi responden terhadap peranan anggota dalam KSM/BKM dapat dilihat pada Tabel 17. Peranan anggota dianggap sangat penting oleh 10 % responden, 13,33 % responden menyatakan peranan anggota

dalam KSM/BKM penting, 63,33 % responden menyatakan cukup penting peranan anggota dalam KSM/BKM, sedang yang menyatakan peranan anggota dalam KSM/BKM tidak penting 13,33 %. Dari Tabel 17 ini membuktikan bahwa peranan anggota atau peserta program cukup penting. Hal ini berarti mendekati teori yang digunakan C. Korten bahwa 63,33 % peserta program harus diperankan sesuai dengan potensi dan tujuan program pembangunan.

Tabel 18

Kesanggupan Anggota KSM Membuat Usul Kegiatan P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Dapat membuat sendiri	7	11,67 %
2	Dapat membuat dengan contoh	5	8,33 %
3	Dapat membuat dengan bimbingan	24	40 %
4	Tidak dapat membuat	24	40 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 10

Data dalam Tabel 18 ini dapat diasumsikan merupakan penjelasan Tabel 17 tentang pentingnya peranan anggota dalam KSM/BKM. Ternyata kesanggupan anggota KSM membuat usul kegiatan P2KP (proposal kegiatan) 40 % responden tidak dapat membuat, 40 % lainnya membuat dengan bimbingan (mencontoh atau dibuatkan), 8,33 % responden dapat membuat dengan contoh dan 11,67 % responden dapat membuat sendiri. Data tabel ini dapat diprediksikan hampir 88,33 % responden tidak dapat membuat rencana kegiatan (proposal) P2KP.

Tabel 19

Cara Merumuskan Usulan Kegiatan P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Musyawarah dengan kelompok	21	35 %
2	Musyawarah dengan petugas PPL/BKM	25	41,67 %
3	Musyawarah dengan staf kelurahan	1	1,67 %
4	Tergantung ketua kelompok	13	21,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 11

Tingkat ketergantungan responden kepada petugas PPL/BKM dan ketua kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat ternyata cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden 41,67 % merumuskan usulan kegiatan P2KP dengan petugas PPL/BKM, tergantung ketua kelompok 21,67 %.

Tabel 20

Kegiatan Diluar P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Mengikuti seluruh program desa	0	0
2	Mengikuti lebih dari satu program desa	7	11,67 %
3	Hanya mengikuti P2KP	51	85 %
4	Tidak tahu	2	3,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 12

Tabel di atas menunjukkan ternyata hanya 85 % responden yang mengikuti kegiatan P2KP, sementara 11,67 % responden mengikuti kegiatan lain yang ada di desa seperti JPS.

Pemahaman responden terhadap kegiatan P2KP yang berupa bantuan modal bergulir atau pinjaman sudah cukup baik, seratus persen responden

UPT-PUSTAK-UNINDP

menyatakan harus dikembalikan beserta bunganya. Sehingga dapat dikatakan masyarakat sudah mempunyai tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap mekanisme utang piutang yang pada umumnya dilaksanakan oleh perbankan. Hal tersebut semakin diperkuat dengan Tabel 21 seperti di bawah ini.

Tabel 21
Persepsi Terhadap Tingkat Suku Bunga Pinjaman

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat menghambat	0	0
2	Menghambat	3	5 %
3	Cukup menghambat	10	16,67 %
4	Tidak menghambat	47	78,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 14

Persepsi responden terhadap tingkat suku bunga pinjaman dalam kegiatan P2KP dinyatakan oleh Tabel 22. 5 % responden menyatakan bunga pinjaman menghambat peningkatan kesejahteraan, 16,67 % menyatakan cukup menghambat, sedang 78,33 % menyatakan bunga tersebut tidak menghambat peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan P2KP. Mengenai besar prosentase bunga di dalam pinjaman P2KP ternyata tidak masalah bagi responden, hanya saja jangka waktu pengembalian pinjaman yang sering menjadi penghambat peningkatan kesejahteraan (keuntungan dalam usaha) sehingga responden dalam Tabel 22 beranggapan bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman merupakan hambatan.

Tabel 22

Persepsi Terhadap Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat menghambat	6	10 %
2	Menghambat	18	30 %
3	Cukup menghambat	18	30 %
4	Tidak menghambat	18	30 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi responden terhadap jangka waktu pengembalian pinjaman P2KP 70 % menyatakan jangka waktu pengembalian terlalu pendek sehingga menghambat perkembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan yang menyatakan jangka waktu pengembalian pinjaman P2KP tidak menghambat hanya 30 %. Hal ini membuktikan belum adanya keseragaman pemahaman tentang dana bergulir yang menjadi kegiatan P2KP. Atau dalam program pembangunan yang dilaksanakan dimana sasarannya adalah orang miskin diperlukan jangka waktu pengembalian kredit yang lebih panjang dibandingkan dengan kredit komersial operasional perbankan.

Tabel 23

Persepsi Terhadap Tanggung Renteng Anggota KSM

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat memberatkan	18	30 %
2	Memberatkan	8	13,33 %
3	Cukup memberatkan	3	5 %
4	Tidak memberatkan	31	51,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 16

Tabel di atas berisi data yang merupakan cek silang persepsi responden terhadap jangka waktu pengembalian pinjaman P2KP. Dalam tabel ini ternyata persepsi responden yang menyatakan bahwa pinjaman P2KP terhadap anggota KSM yang harus ditanggung secara tanggung renteng dirasakan memberatkan hanya 43,38 %, sedang yang menyatakan tidak memberatkan sebesar 51,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap jangka waktu pengembalian pinjaman dan terhadap sistem tanggung renteng pertanggungjawaban hutang kelompok tidak ada sinkronisasi. Masih diperlukan penelitian yang lebih detail terhadap jangka waktu pengembalian pinjaman dan sistem tanggung renteng di dalam mengembalikan pinjaman. Nampaknya sebagian masyarakat merasa keberatan apabila dibebani dengan kewajiban anggota yang tidak memenuhi kewajibannya sendiri.

4.1.2.3. Status Sosial Ekonomi (X1)

Untuk variabel status sosial ekonomi diuraikan dan diteliti berdasarkan indikator pendidikan responden, tingkat pendapatan responden, kekayaan responden dan tanggungan keluarga responden. Tabel di bawah ini menyajikan data pendidikan yang dimiliki oleh responden.

Tabel 24
Tingkat Pendidikan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Tidak lulus SD	13	21,67 %
2	Lulus SD/Madrasah	17	28,33 %
3	Lulus SMP/Tsanawiyah	12	20 %
4	Lulus SLTA/Aliyah	18	30 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 17

Tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan responden 70 % hanya sampai lulus SMP/Tsanawiyah. Prosentase terbesar lulusan SD/Madrasah, sedang lulusan SLTA/Aliyah hanya 30 % dari 100 % responden.

Tabel 25
Pendidikan Diluar Sekolah

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Tidak mengikuti pendidikan lain	46	76,67 %
2	Pondok pesantren	7	11,67 %
3	Kursus ketrampilan	6	10 %
4	Pendidikan kilat	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 18

Dari tabel di atas dapat diprediksikan bahwa keterbatasan pendidikan responden makin diperjelas ketika 76,67 % menyatakan tidak mengikuti pendidikan lain selain pendidikan formal yang telah diikuti. Mengikuti pendidikan pondok pesantren 11,67 %, kursus ketrampilan 10 % dan pendidikan kilat 1,67 % merupakan indikator yang menunjukkan latar belakang pendidikan responden sangat minimum.

Tabel 26
Kemampuan Membaca dan Menulis

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Kursus bebas 3 buta kelurahan	11	18,33 %
2	Persamaan SD	0	0
3	Kejar paket A dll	1	1,67 %
4	Sekolah	46	76,67 %
5	Tidak menjawab	2	3,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 19

Tabel di atas menunjukkan pada dasarnya responden mempunyai kemampuan membaca dan menulis, baik diperoleh dari kursus bebas 3 buta yang dinyatakan oleh responden sejumlah 18,33 %, kejar Paket A 1,67 %, dan prosentase terbesar 76,67 % ketrampilan membaca dan menulis responden diperoleh dari sekolah.

Tabel 27
Informasi Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Kepala/Aparat Desa	0	0
2	Petugas Penyuluhan Lapangan	6	10 %
3	Panitia Program P2KP	5	8,33 %
4	Belajar Sendiri	48	80 %
5	Tidak menjawab	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 20

Tabel 27 di atas menunjukkan data upaya aparatur desa dan lembaga lain di dalam meningkatkan pengetahuan responden di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dari data di atas dapat diketahui ternyata kepala/aparat desa tidak berperan di dalam meningkatkan pengetahuan

responden. Petugas penyuluhan lapangan berperanan 10 %, panitia P2KP 8,33 %, dan belajar sendiri 80 %. Dari sini dapat diketahui masih perlu adanya peranan kepala/aparat desa sebagai lembaga publik di dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Tabel 28
Pendapatan Responden Per tahun

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Kurang dari Rp. 1.800.000,-	6	10 %
2	Rp. 1.800.000,- - Rp. 2.400.000,-	38	63,33 %
3	Rp. 2.400.000,- - Rp. 3.000.000,-	11	18,33 %
4	Lebih dari Rp. 3.000.000,-	4	6,67 %
5	Tidak menjawab	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 21

Tabel di atas menyajikan data pendapatan responden per tahun, dimana 10 % menyatakan berpendapatan kurang dari Rp. 1.800.000,- per tahun 63,33 % mempunyai pendapatan Rp. 1.800.000,- - Rp. 2.400.000,- per tahun, Rp. 2.400.000,- - Rp. 3.000.000,- per tahun sebanyak 18,33 %, lebih dari Rp. 3.000.000,- sebanyak 6,67 %. Tabel ini akan semakin jelas apabila dikonfirmasi dengan tabel di bawah ini.

Tabel 29
Pendapatan Responden Per Bulan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Kurang dari Rp. 150.000,-	6	10 %
2	Rp. 150.000,- - Rp. 200.000,-	37	61,67 %
3	Rp. 200.000,- - Rp. 250.000,-	12	20 %
4	Lebih dari Rp. 250.000,-	4	6,67 %
5	Tidak menjawab	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 22

Tabel di atas menyajikan data pendapatan responden per bulan, dimana 10 % menyatakan berpendapatan kurang dari Rp. 150.000,- per bulan, 61,67 % mempunyai pendapatan Rp. 150.000,- - Rp. 200.000,- per bulan, Rp. 200.000,- - Rp. 250.000,- per bulan sebanyak 20 %, lebih dari Rp. 250.000,- sebanyak 6,67 %. Dilihat dari besar prosentase sebagaimana tabel di atas maka responden yang memenuhi persyaratan mengikuti P2KP mempunyai pendapatan sebesar Rp. 250.000,- per bulan hanya 91,67 %. Jadi masih dapat dikategorikan pelaksanaan P2KP memnuhi persyaratan.

Tabel 30
Pendapatan Diluar Pekerjaan Pokok

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Kurang dari Rp. 50.000,-	12	20 %
2	Rp. 50.000,- - Rp. 75.000,-	22	36,67 %
3	Rp. 75.000,- - Rp. 100.000,-	8	13,33 %
4	Tidak ada pendapatan lainnya	17	28,33 %
5	Tidak menjawab	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 23

Tabel di atas menyajikan data bahwa ternyata responden juga mendapatkan pendapatan di luar pekerjaan pokok. 20 % responden mengaku mendapat pendapatan di luar pekerjaan pokok kurang dari Rp. 50.000,-, 36,67 % responden mengakui mendapatkan pendapatan di luar pekerjaan pokok Rp. 50.000,- - Rp. 75.000,- dan 13,33 % mengaku mendapat pendapatan di luar pekerjaan pokok sebesar Rp. 75.000,- - Rp. 100.000,-, sedangkan yang tidak mendapat pendapatan di luar pekerjaan pokok 28,33 %. Dari Tabel 28, Tabel 29 dan Tabel 30 dapat diketahui ada sekitar 6 – 10 % responden yang mempunyai penghasilan pokok lebih dari Rp. 250.000,- per bulan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan P2KP yang menyatakan obyek tidak boleh mempunyai pendapat pokok lebih dari Rp. 250.000,- per bulan.

Tabel 31

Pendapatan Tambahan Dari P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Rp. 25.000,- - Rp. 50.000,- per bulan	8	13,33 %
2	Rp. 15.000,- - Rp. 20.000,- per bulan	19	31,67 %
3	Rp. 5.000,- - Rp. 10.000,- per bulan	32	53,33 %
4	Selalu merugi	0	0
5	Tidak menjawab	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 24

Ternyata kegiatan P2KP yang dilaksanakan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal mampu meningkatkan pendapatann yang dibuktikan dengan adanya pendapatan tambahan dari P2KP Rp. 25.000,- - Rp. 50.000,- per bulan dinyatakan oleh 13,33 % responden, Rp. 15.000,- -

Rp. 20.000,- per bulan dinyatakan oleh 31,67 % responden, Rp. 5.000,- - Rp. 10.000,- per bulan dinyatakan oleh 53,33 % responden. Dari data di atas dapat diketahui pendapatan tambahan dari P2KP ternyata relatif kecil yang paling banyak diterima oleh responden. Dari kenyataan tersebut perlu adanya pemikiran pemerataan pendapatan dari suatu program pembangunan masyarakat.

Tabel 32
Kepemilikan Rumah

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Milik sendiri	38	63,33 %
2	Milik orang tua/mertua/waris	14	23,33 %
3	Menyewa milik orang lain	5	8,33 %
4	Menumpang sesama warga	1	1,67 %
5	Tidak menjawab	2	3,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 25

Tabel di atas menunjukkan kemampuan ekonomi dari responden 63,33 % responden menyatakan memiliki rumah sendiri, 23,33 % mendapat waris dari orang tua, dan 8,33 % responden menyatakan menyewa rumah milik orang lain.

Tabel 33
Kepemilikan Sawah/Tegalan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Milik sendiri	36	60 %
2	Milik orang tua/mertua/waris	9	15 %
3	Menyewa milik orang lain	5	8,33 %
4	Menumpang sesama warga	0	0
5	Tidak menjawab	10	16,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 26

Indikator kemampuan ekonomi juga dilihat dari kepemilikan sawah/tegalan oleh responden. 60 % responden menyatakan memiliki sawah/tegalan sendiri, 15 % mengaku memiliki sawah/tegalan warisan dari orang tua, sedang yang menyatakan menyewa lahan sawah/tegalan 8,33 %. Dengan demikian dapat dikatakan 75 % responden memiliki rumah maupun sawah/tegalan sendiri termasuk yang berasal dari warisan orang tua.

Tabel 34
Pemeliharaan Ternak

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Penghasilan pokok sebagai blantik	2	3,33 %
2	Sebagai hasil sampingan	11	18,33 %
3	Sebagai tabungan	9	15 %
4	Tidak memelihara ternak	38	63,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 27

Tabel di atas menyajikan data pemeliharaan ternak yang dilakukan responden baik sebagai penghasilan pokok, penghasilan sampingan maupun sebagai tabungan. Ternyata yang memelihara ternak sebagai penghasilan pokok hanya 3,33 %, sedang yang memelihara ternak sebagai hasil sampingan 18,33 %, dan ternak sebagai tabungan 15 %. Seharusnya sesuai dengan konsep P2KP responden yang mendapat bantuan ialah mereka yang berpenghasilan pokok dari pemeliharaan/jual beli ternak, tetapi justru yang mendapatkan bantuan dari P2KP adalah mereka yang tidak berdagang ternak.

Tabel 35
Penanam Pohon Tahunan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Penghasilan pokok	0	0
2	Sebagai hasil tambahan	3	5 %
3	Sebagai tabungan	7	11,67 %
4	Tidak menanam pohon tahunan	50	83,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 28

Tabel di atas menunjukkan responden yang berpenghasilan pokok dari menanam pohon tahunan (seperti mangga, rambutan, durian,dll) ternyata tidak ada. 5 % responden menanam pohon tahunan sebagai hasil tambahan dan 11,67 % menanam pohon tahunan sebagai tabungan.

Tabel 36
Tanggungan Anak

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Tidak punya	3	1 %
2	1 – 2 (dua) orang	36	60 %
3	3 (tiga) orang	7	11,67 %
4	Lebih dari 4 (empat) orang	9	15 %
5	Tidak menjawab	5	8,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 29

Tabel ini merupakan tabulasi dari kemampuan responden dalam kaitannya dengan kewajiban yang harus di tanggung oleh responden. 60 % mempunyai tanggungan anak 1 – 2 orang, 11,67 % responden mempunyai 3 orang anak dan 15 % responden menyatakan mempunyai tanggungan anak lebih

dari 4 orang. Kalau di lihat dari data di atas 86,67 % responden mempunyai tanggungan anak.

Tabel 37
Tanggungan Keluarga

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Kurang dari 3 (tiga) orang	24	40 %
2	4 (empat) orang	31	51,67 %
3	5 (lima) orang	3	5 %
4	Lebih dari 5 orang	2	3,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 30

Responden yang mempunyai tanggungan keluarga dinyatakan di dalam tabel ini, yaitu kurang dari 3 orang sebesar 40 % responden, mempunyai tanggungan 4 orang 51,67 %, mempunyai tanggungan 5 orang 5 %, dan lebih dari 5 orang 3,33 %. Melihat prosentase alam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa 51,67 % peserta P2KP mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 4 orang. Hal tersebut semakin diperkuat oleh tabel di bawah ini.

Tabel 38
Tanggungan Keluarga Diluar Rumah

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Isteri lain dan anak-anaknya	0	0
2	Orang tua atau mertua	8	13,33 %
3	Saudara yang belum bekerja/rumah tangga	1	1,67 %
4	Tidak mempunyai tanggungan keluarga lain	51	85 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 31

Tanggungan responden terhadap keluarga di luar rumah yang dimasukkan disini adalahh tanggungan responden terhadap keluarga lain yang

tidak tinggal dalam satu rumah. Tabel di atas menunjukkan 13,33 % responden mempunyai tanggungan orang tua atau mertua, 1,67 % responden mempunyai tanggungan saudara yang belum bekerja, dan 85 % responden hanya mempunyai tanggungan keluarga sendiri (istri dan anak-anaknya). Jumlah tanggungan keluarga di atas baik yang dinyatakan dalam Tabel 37 maupun dalam Tabel 38 akan menjadi lebih jelas apabila dikaitkan dengan pengeluaran biaya hidup per bulan sebagaimana dinyatakan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 39
Pengeluaran Biaya Hidup Per Bulan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Kurang lebih Rp. 150.000,- per bulan	26	43,33 %
2	Kurang lebih Rp. 200.000,- per bulan	19	31,67 %
3	Kurang lebih Rp. 250.000,- per bulan	5	8,33 %
4	Lebih dari Rp 250.000,-	8	13,33 %
5	Tidak menjawab	2	3,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 32

Dari tabel di atas dapat diketahui 43,33 % responden biaya hidup per bulan kurang lebih Rp. 150.000,- , 31,67 % kurang lebih Rp. 200.000,- per bulan, 8,33 % kurang lebih Rp. 250.000,- per bulan, lebih dari Rp 250.000,- 13,33 %. Tabel di atas kalau dikonfirmasi dengan data penghasilan (Tabel 29) maka dapat dikatakan antara pendapatan dan biaya hidup per bulan rata-rata inpas. Dari data di atas juga dapat diketahui seharusnya responden yang mengeluarkan biaya hidup per bulan di antara Rp. 250.000,- atau lebih yang harus diikutsertakan dalam kegiatan P2KP ternyata hanya 21,66 %.

4.1.2.4. Kepemimpinan (X2)

Variabel kepemimpinan diteliti berdasarkan indikator tinggi rendahnya kepercayaan aparatur desa terhadap responden, kesediaan pimpinan (aparatur desa serta petugas lapangan P2KP) memberi bimbingan kepada peserta program dan tingkat krestifitas pimpinan (aparatur desa serta petugas P2KP). Kepercayaan aparatur desa dapat diidentifikasi seperti yang dinyatakan tabel di bawah ini.

Tabel 40

Wewenang Melaksanakan P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat berperan	5	8,33 %
2	Berperan	13	21,67 %
3	Cukup berperan	35	58,33 %
4	Tidak berperan	7	11,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 33

Tabel 40 merupakan rangkuman jawaban responden tentang peranan anggota dalam melaksanakan P2KP. Data di atas menunjukkan yang sangat berperan 8,33 %, berperan 21,67 %, cukup berperan 58,33 %, dan tidak berperan 11,67 %. Yang perlu dipertanyakan tentang tidak berperannya anggota sebesar 11,67 %, apakah anggota ini hanya ikut-ikutan saja sebagai pelengkap ataukah ada motivasi-motivasi lain.

Tabel 41

Kepercayaan Aparatur Kelurahan Terhadap Pelaksanaan P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat puas	3	5 %
2	Puas	37	61,67 %
3	Kurang puas	16	26,67 %
4	Tidak puas	4	6,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 34

Asumsi terhadap tingkat kepercayaan aparatur kelurahan pada pelaksana P2KP dinyatakan dalam tabel ini. 5 % responden menyatakan sangat puas atas kepercayaan aparatur kelurahan, 61,67 % responden menyatakan puas, kurang puas 26,67 %, dan tidak puas 6,67 %. Dari data ini maka dapat dikatakan 33,34 % responden merasa tidak puas terhadap aparatur kelurahan dalam memberikan kepercayaan pelaksanaan P2KP.

Tabel 42

Program Lain Yang Diajukan Desa

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat sering	1	1,67 %
2	Sering	10	16,66 %
3	Kadang-kadang	37	61,67 %
4	Tidak pernah	12	20 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 35

Tawaran mengikuti program lain selain P2KP yang ditawarkan kepada responden 20 % menyatakan tidak pernah, 61,67 % menyatakan kadang-kadang ditawarkan, 1,67 % sangat sering ditawarkan untuk mengikuti program-program lain oleh desa. Dari prosentase Tabel 42 dapat dikomulasikan 80 % peserta

P2KP pernah ditawari dan atau mengikuti program lain yang diajukan oleh desa. Program lain tersebut bisa saja berupa program Taskin, JPS, dan lain sebagainya yang merupakan program-program masyarakat dari pemerintah. Dengan melihat besarnya prosentase 80 % maka dapat diasumsikan bahwa peserta P2KP juga merupakan peserta program pembangunan yang lainnya.

Tabel 43
Pujian Kepala Desa

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat sering	0	0
2	Sering	5	8,33 %
3	Kadang-kadang	32	53,33 %
4	Tidak pernah	23	38,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 36

Pujian yang dimaksudkan di sini sebagai indikator kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa kepada responden dengan tujuan memotivasi responden dalam mengikuti P2KP. Tabel 43 menunjukkan 8,33 % responden sering mendapat pujian dari kepala desa, 53,33 % kadang-kadang, dan 38,33 % tidak pernah.

Tabel 44
Petunjuk Dan Bimbingan Aparatur Desa

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat sering	0	0
2	Sering	8	13,33 %
3	Kadang-kadang	16	26,67 %
4	Tidak pernah	36	60 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 37

Petunjuk dan bimbingan aparatur desa juga digunakan sebagai indikator kepemimpinan. Ternyata 60 % menyatakan tidak pernah memperoleh petunjuk dan bimbingan dari aparatur desa dalam melaksanakan P2KP, 26,67 % menyatakan kadang-kadang mendapat petunjuk dan bimbingan dari aparatur desa dalam melaksanakan P2KP, sedang yang menyatakan sering mendapat dan bimbingan dari aparatur desa dalam melaksanakan P2KP sebesar 13,33 %. Hal ini dapat dikonfirmasi dari contoh yang diberikan aparatur desa dalam melaksanakan P2KP sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut ini.

Tabel 45
Contoh Dari Aparatur Desa

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat sering	1	1,67 %
2	Sering	5	8,33 %
3	Kadang-kadang	36	60 %
4	Tidak pernah	18	30 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 38

Ternyata yang di dapat oleh responden contoh dari aparatur desa sangat sering dinyatakan oleh responden sebesar 1,67 %, dan yang menyatakan sering 8,33 %, sedang yang menyatakan kadang-kadang mendapatkan contoh dari aparatur desa sebesar 60 % dan yang menyatakan tidak pernah sebesar 30 %. Dengan demikian dapat disimpulkan 90 % responden menyatakan tidak mendapat contoh dari aparatur desa di dalam melaksanakan P2KP.

Tabel 46

Petunjuk Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat sering	1	1,67 %
2	Sering	4	6,67 %
3	Kadang-kadang	40	66,67 %
4	Tidak pernah	15	25 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 39

Petunjuk aparatur desa untuk meningkatkan pendapatan responden melalui P2KP ternyata 1,67 % menyatakan sangat sering dan 6,67 % menyatakan sering. Tetapi 66,67 % responden menyatakan kadang-kadang saja menerima petunjuk aparatur desa untuk meningkatkan pendapatan dan 25 % responden menyatakan tidak pernah mendapat petunjuk aparatur desa.

Tabel 47

Peranan Aparatur Desa Dalam Memecahkan Masalah

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat sering	0	0
2	Sering	3	5 %
3	Kadang-kadang	23	38,33 %
4	Tidak pernah	34	56,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 40

Peranan aparatur desa dalam memecahkan masalah ternyata 56,67 % menyatakan tidak pernah, 38,33 % menyatakan kadang-kadang dan 5 % sering membantu dalam memecahkan masalah. Di sini nampak adanya peranan aparatur pemerintah desa di dalam pelaksanaan P2KP.

Tabel 48
Mekanisme Pemilihan P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sudah ditentukan oleh Kepala Desa	0	0
2	Pilihan sendiri	55	91,67 %
3	Program Kecamatan	0	0
4	Tidak pernah ditawarkan	5	8,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 41

Tabel di atas dimaksudkan untuk mengetahui apakah setiap peserta P2KP mempunyai kebebasan untuk memilih program yang dikehendaki dan sesuai dengan kebutuhan peserta program. Tabel 48 menunjukkan 91,67 % responden mengaku memilih P2KP sesuai dengan pilihan sendiri, sedangkan 8,33 % responden menyatakan tidak pernah ditawari hanya ikut-ikutan saja. Persepsi terhadap adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga ternyata mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat peserta P2KP. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dinyatakan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 49
Persepsi Terhadap Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat senang	47	78,33 %
2	Senang	12	20 %
3	Kurang senang	1	1,67 %
4	Tidak senang	0	0
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 42

Tabel di atas menunjukkan 78,33 % responden menyatakan sangat senang, dan 20 % responden menyatakan senang. Sedang yang menyatakan

kurang senang hanya 1,67 % responden. Hal ini menunjukkan 98,33 % responden mempunyai asumsi senang dengan adanya usaha peningkatan pendapatan keluarga terutama melalui kegiatan P2KP.

Tabel 50

Keberhasilan Desa Lain Sebagai Stimulus

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat sering	1	1,67 %
2	Sering	0	0
3	Kadang-kadang	39	65 %
4	Tidak pernah	20	33,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 43

Tabel 50 keberhasilan desa lain dalam melaksanakan P2KP ternyata bukan menjadi pemicu (stimulus) keberhasilan P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Hal tersebut terbukti dari tabel di atas yang menyatakan kadang-kadang terpengaruh oleh keberhasilan desa lain dalam melaksanakan P2KP 65 % dan yang menyatakan tidak pernah terstimulasi keberhasilan desa lain sebesar 33,33 %, sedang yang menyatakan sering dan sangat sering hanya 1,67 %.

Tabel 51
Persepsi Terhadap Peran P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat membantu	10	16,67 %
2	Membantu	24	40 %
3	Cukup membantu	25	41,67 %
4	Tidak membantu	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 44

Bagaimana persepsi responden terhadap peran P2KP dapat dilihat dari persepsi responden dalam tabel di atas. Responden yang menyatakan sangat membantu 16,67 % dan yang menyatakan membantu 40 %. Sedang yang menyatakan cukup membantu sebesar 41,67 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 56,67 % responden mempunyai persepsi bahwa P2KP cukup berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

4.1.2.5. Komunikasi (X3)

Variabel komunikasi sebagai variabel bebas yang ingin diketahui ada atau tidak pengaruhnya terhadap efektivitas P2KP diteliti dari indikator komunikasi ke bawah yaitu komunikasi yang dilakukan aparatur desa dan petugas lapangan P2KP kepada peserta program, komunikasi ke atas yaitu komunikasi yang dilakukan antara peserta program dengan aparatur desa dan petugas P2KP dan indikator terakhir komunikasi horisontal yaitu komunikasi antara sesama anggota.

Aparatur desa dan petugas lapangan P2KP merupakan mediator (pelaksana) program P2KP yang menjembatani program dengan peserta program. Sesuai dengan peranannya maka bimbingan dari aparatur pemerintah kepada peserta program merupakan hal yang harus dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bimbingan dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tertera dalam tabel di bawah ini

Tabel 52
Bimbingan Dari Aparatur Pemerintah

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Selalu mendapat bimbingan	33	55 %
2	Kadang-kadang mendapat bimbingan	21	35 %
3	Tidak pernah mendapat bimbingan	6	10 %
4	Tidak tahu	0	0
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 45

Dalam Tabel 52 yang merasa selalu mendapatkan bimbingan dari aparatur pemerintah sebesar 55 %, 35 % kadang-kadang, dan tidak pernah mendapat bimbingan 10 %.

Tabel 53
Tingkat Kesulitan P2KP

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Selalu mendapat kesulitan	0	0
2	Kadang-kadang mendapat kesulitan	19	31,67 %
3	Tidak pernah mendapat kesulitan	39	65 %
4	Tidak tahu	2	3,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 46

Tabel di atas menunjukkan tingkat kesulitan program penanggulangan kemiskinan perkotaan menurut pendapat responden 31,67 % menyatakan kadang-kadang mendapat kesulitan, dan 65 % responden menyatakan tidak pernah mengalami kesulitan.

Tabel 54
Pembinaan Staf Kelurahan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Selalu memperoleh penjelasan	46	76,67 %
2	Kadang-kadang memperoleh penjelasan	11	18,33 %
3	Tidak pernah memperoleh penjelasan	1	1,67 %
4	Tidak tahu	2	3,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 47

Tabel di atas menunjukkan alur komunikasi atasan bawahan dalam bentuk pembinaan yang diberikan kepada responden dalam melaksanakan P2KP. 76,67 % responden menyatakan selalu memperoleh penjelasan dari staf kelurahan/desa, 18,33 % responden menyatakan kadang-kadang memperoleh penjelasan, sementara yang menyatakan tidak pernah memperoleh penjelasan dan tidak tahu sebesar 5 %, sehingga 95 % responden menyatakan mendapat pembinaan dari staf kelurahan/desa.

Tabel 55

Penilaian Terhadap Komunikasi Dengan Petugas Lapangan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Sangat baik	7	11,67 %
2	Baik	27	45 %
3	Cukup baik	25	41,67 %
4	Tidak baik	1	1,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 48

Bagaimana komunikasi dengan petugas lapangan menurut penilaian responden ternyata cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas yang menyajikan data penilaian sangat baik terhadap komunikasi dengan petugas lapangan dinyatakan oleh 11,67 % responden, penilaian baik dinyatakan oleh 45 % responden dan penilaian cukup baik dinyatakan oleh 41,67 % responden. Dengan demikian dapat dikalkulasikan 98,34 % responden menilai baik komunikasi yang dilakukan dengan petugas lapangan.

Tabel 56

Persepsi Terhadap Tanggapan Petugas Lapangan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Selalu ditanggapi dengan baik	46	76,67 %
2	Kadang-kadang ditanggapi dengan baik	11	18,33 %
3	Ditanggapi tidak baik	0	0
4	Tidak tahu	3	5 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 49

Tabel ini dapat digunakan untuk mengkonfirmasi keterangan responden dalam Tabel 55. Tabel 56 menyajikan data 76,67 % responden merasa selalu ditanggapi dengan baik oleh petugas lapangan P2KP, 18,33 % responden

menyatakan kadang-kadang ditanggapi dengan baik oleh petugas lapangan P2KP, sementara yang menyatakan tidak tahu 5 % responden. Dari Tabel 55 dan Tabel 56 ini baik penilaian komunikasi atas bawah dalam Tabel 55 maupun komunikasi bawah atas dalam Tabel 56 rata-rata terselenggara dengan baik.

Tabel 57
Penyampaian Kritik dan Tanggapan Aparatur Desa

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Selalu mendapat tanggapan yang baik	51	85 %
2	Kadang-kadang mendapat tanggapan yang baik	5	8,33 %
3	Tidak mendapat tanggapan yang baik	0	0
4	Tidak tahu	4	6,67 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 50

Penyampaian kritik dan tanggapan aparatur desa juga merupakan salah satu indikator dari komunikasi bawah atas yang dilakukan. Tabel di atas menyajikan data responden yang menyatakan kritik yang disampaikan selalu mendapat tanggapan yang baik sebesar 85 %, dan kadang-kadang mendapat tanggapan dengan baik sebesar 8,33 %. Kumulatifnya untuk penyampaian kritik dan tanggapan aparatur desa dinyatakan baik oleh 93,33 % responden.

Tabel 58
Cara Melakukan Bimbingan Aparatur Desa

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Selalu dilakukan dengan baik	52	86,67 %
2	Kadang-kadang dilakukan dengan baik	5	8,33 %
3	Tidak dilakukan dengan baik	0	0
4	Tidak tahu	3	5 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 51

Bagaimana cara melakukan bimbingan kepada responden yang dilakukan oleh aparatur desa dalam pelaksanaan P2KP ternyata penilaian responden selalu dilakukan dengan baik dinyatakan oleh responden 86,67 %, sedang yang menyatakan kadang-kadang dilakukan dengan baik 8,33 %. Hal tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara bimbingan aparatur desa dengan kebutuhan responden.

Tabel 59

Respon Aparatur Terhadap Ide Peserta Program

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Selalu ditanggapi dengan baik	49	81,67 %
2	Kadang-kadang ditanggapi dengan baik	6	10 %
3	Ditanggapi tidak baik	2	3,33 %
4	Tidak tahu	3	5 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 52

Bagaimana penilaian responden terhadap respon aparatur desa atas ide peserta P2KP dapat dilihat dari tabel ini. Responden yang menyatakan selalu mendapat tanggapan dengan baik 81,67 %, kadang-kadang ditanggapi dengan baik 10 % dan yang menyatakan tidak ditanggapi dengan baik hanya 3,33 %.

Tabel 60

Komunikasi Antara Anggota

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Selalu membicarakan	0	0
2	Kadang-kadang membicarakan	56	93,33 %
3	Tidak pernah membicarakan	1	1,67 %
4	Tidak tahu	3	5 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 53

Komunikasi sebagai aspek yang cukup penting bagi keberhasilan suatu program dapat dilihat dari data tabel di atas. Komunikasi antar anggota yang dalam wujud nyata membicarakan soal kegiatan P2KP yang diikuti ternyata 93,33 % responden menyatakan hanya kadang-kadang saja yang membicarakan dengan anggota lain, sedang yang tidak pernah membicarakan dengan anggota lainnya 1,67 %. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan P2KP responden lebih banyak mengetahui sehingga merasa tidak perlu selalu membicarakannya dengan anggota lain.

Tabel 61

Komunikasi Antar Kelompok Swadaya Masyarakat

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Selalu membicarakan	13	21,67 %
2	Kadang-kadang membicarakan	23	38,33 %
3	Tidak pernah membicarakan	19	31,67 %
4	Tidak tahu	5	8,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 54

Kalau Tabel 60 menyajikan data komunikasi antara anggota dalam suatu kelompok maka dalam Tabel 61 ini menyajikan data komunikasi antar anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM). Ternyata 21,67 % responden menyatakan selalu membicarakan P2KP dengan kelompok-kelompok lain, 38,33 % responden menyatakan kadang-kadang membicarakannya sedang 31,67 % responden menyatakan tidak pernah membicarakan dengan KSM lainnya.

Tabel 62

Mengevaluasi Kegagalan Program Dengan Sesama Kelompok

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Selalu membicarakan	9	15 %
2	Kadang-kadang membicarakan	44	73,33 %
3	Tidak pernah membicarakan	5	8,33 %
4	Tidak tahu	2	3,33 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 55

Mengevaluasi kegagalan program dengan sesama anggota kelompok merupakan salah satu upaya efisiensi P2KP. Dari data di atas dapat diketahui bahwa 15 % responden mengaku selalu membicarakan kegagalan P2KP dengan sesama anggota kelompok, 73,33 % responden menyatakan kadang-kadang saja membicarakan kegagalan P2KP dengan sesama kelompok, 8,33 % responden menyatakan tidak pernah membicarakan kegagalan P2KP dengan sesama kelompok dan responden yang menjawab tidak tahu sebesar 3,33 %.

Tabel 63

Mengevaluasi Program Dengan Kelompok Lain

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	Selalu membicarakan	7	11,67 %
2	Kadang-kadang membicarakan	32	53,33 %
3	Tidak pernah membicarakan	18	30 %
4	Tidak tahu	3	5 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Questioner No. 56

Tabel di atas menyajikan data apakah peserta P2KP juga melakukan evaluasi terhadap program yang diikutinya dengan kelompok lain. Tabel di atas memberikan data responden yang selalu membicarakan dengan kelompok lain

11,67 %, kadang-kadang membicarakan 53,33 %, dan yang tidak pernah membicarakan program dengan kelompok lain 30 %. Dengan data ini maka dapat diketahui baik terhadap kegagalan program yang dilakukan maupun keberhasilan P2KP yang diikuti hanya kadang-kadang saja dibicarakan dinyatakan oleh 53,33 % responden.

4.1.3. Rekapitulasi Kondisi Variabel Penelitian

Untuk mengetahui beberapa hubungan antar tabel untuk masing-masing variabel maka dapat dihitung nilai-nilai jawaban responden seperti di bawah ini :

Tabel 64
Skore Jawaban Responden

No. Resp	Sosial Ekonomi	Kepemimpinan	Komunikasi	Efektivitas P2KP
1	29	26	38	40
2	34	26	38	41
3	35	26	40	44
4	42	27	38	37
5	42	27	38	40
6	40	30	40	45
7	40	28	39	43
8	38	26	38	42
9	41	29	39	36
10	26	24	38	43
11	49	27	38	36
12	49	26	37	40
13	38	30	40	45
14	45	27	40	40
15	45	27	38	40
16	45	27	38	37
17	37	26	39	41
18	44	27	38	37
19	36	26	35	40
20	42	24	40	36
21	43	25	37	41
22	42	26	39	41
23	39	24	40	41
24	39	27	39	42
25	45	28	38	36
26	35	15	22	33
27	31	16	23	43
28	33	22	37	46
29	30	23	27	44
30	34	18	29	39
31	37	17	30	39
32	31	18	35	51
33	27	22	36	51
34	38	20	31	38
35	31	16	13	40
36	39	29	46	52
37	36	25	45	51
38	37	32	44	51
39	38	37	47	49
40	44	29	45	52
41	39	32	43	53
42	36	31	43	48
43	37	30	46	46
44	41	29	46	42
45	38	31	45	46
46	39	23	43	45
47	41	26	45	56
48	45	23	41	43
49	36	28	37	50
50	36	30	42	46

lanjutan

51	41	29	42	34
52	41	26	43	50
53	40	28	40	47
54	37	26	41	50
55	42	34	40	52
56	43	32	39	47
57	41	26	41	45
58	36	28	40	45
59	40	24	39	49
60	36	36	43	50

Untuk menentukan skor digunakan rumus :

$$i = \frac{R}{K}$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R = Skor tertinggi - skor terendah

K = Jumlah kelas

$$\begin{aligned} i &= \frac{R}{K} \\ &= \frac{4 - 1}{4} \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh klasifikasi skor sebagai berikut :

Tabel 65
Klasifikasi Skor

Kategori Penilaian	Notasi	Rata Score
Tidak baik	Tb	1,00 - 1,74
Kurang baik	Kb	1,75 - 2,49
Cukup baik	Cb	2,50 - 3,24
Sangat baik	Sb	3,25 - 4,00

Berdasarkan klasifikasi seperti di atas, maka data (skor) efektivitas P2KP dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 66
Klasifikasi Penilaian Variabel Efektivitas P2KP

No. Resp	Jumlah Item	Nilai	Mean Score	Ket
1	16	40	2,50	Cb
2	16	41	2,56	Cb
3	16	44	2,75	Cb
4	16	37	2,31	Kb
5	16	40	2,50	Cb
6	16	45	2,81	Cb
7	16	43	2,69	Cb
8	16	42	2,63	Cb
9	16	36	2,25	Kb
10	16	43	2,69	Cb
11	16	36	2,25	Kb
12	16	40	2,50	Cb
13	16	45	2,81	Cb
14	16	40	2,50	Cb
15	16	40	2,50	Cb
16	16	37	2,31	Kb
17	16	41	2,56	Cb
18	16	37	2,31	Kb
19	16	40	2,50	Cb
20	16	36	2,25	Kb
21	16	41	2,56	Cb
22	16	41	2,56	Cb
23	16	41	2,56	Cb
24	16	42	2,63	Cb
25	16	36	2,25	Kb
26	16	33	2,06	Kb
27	16	43	2,69	Cb
28	16	46	2,88	Cb
29	16	44	2,75	Cb
30	16	39	2,44	Kb
31	16	39	2,44	Kb
32	16	51	3,19	Cb
33	16	51	3,19	Cb
34	16	38	2,38	Kb
35	16	40	2,50	Cb
36	16	52	3,25	Sb
37	16	51	3,19	Cb
38	16	51	3,19	Cb
39	16	49	3,06	Cb
40	16	52	3,25	Sb
41	16	53	3,31	Sb
42	16	48	3,00	Cb
43	16	46	2,88	Cb
44	16	42	2,63	Cb
45	16	46	2,88	Cb
46	16	45	2,81	Cb
47	16	56	3,50	Sb
48	16	43	2,69	Cb
49	16	50	3,13	Cb
50	16	46	2,88	Cb

lanjutan

51	16	34	2,13	Kb
52	16	50	3,13	Cb
53	16	47	2,94	Cb
54	16	50	3,13	Cb
55	16	52	3,25	Sb
56	16	47	2,94	Cb
57	16	45	2,81	Cb
58	16	45	2,81	Cb
59	16	49	3,06	Cb
60	16	50	3,13	Cb

Tabel 67
Kategorisasi Skore Variabel Efektivitas P2KP

Kategori Efektivitas P2KP	Jumlah	Prosentase
Tidak baik	-	-
Kurang baik	12	20
Cukup baik	43	71,67
Sangat baik	5	8,33
Jumlah	60	100

Diolah dari : Pertanyaan No. 1 s / d 16

Dari hasil perhitungan klasifikasi skor maupun kategori secara umum efektivitas P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari prosentase hasil perhitungan kategori jawaban responden 71,67 % menyatakan cukup baik, dan 8,33 % menyatakan sangat baik. Dalam perhitungan kategori di atas masih terdapat tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebesar 20 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal 80 % berkategori cukup baik.

Tabel 68
Klasifikasi Penilaian Variabel Status Sosial Ekonomi

No. Resp	Jumlah Item	Nilai	Mean Score	Ket
1	16	29	1,81	Kb
2	16	34	2,13	Kb
3	16	35	2,19	Kb
4	16	42	2,63	Cb
5	16	42	2,63	Cb
6	16	40	2,50	Cb
7	16	40	2,50	Cb
8	16	38	2,38	Kb
9	16	41	2,56	Cb
10	16	26	1,63	Kb
11	16	49	3,06	Cb
12	16	49	3,06	Cb
13	16	38	2,38	Kb
14	16	45	2,81	Cb
15	16	45	2,81	Cb
16	16	45	2,81	Cb
17	16	37	2,31	Kb
18	16	44	2,75	Cb
19	16	36	2,25	Kb
20	16	42	2,63	Cb
21	16	43	2,69	Cb
22	16	42	2,63	Cb
23	16	39	2,44	Kb
24	16	39	2,44	Kb
25	16	45	2,81	Cb
26	16	35	2,19	Kb
27	16	31	1,94	Kb
28	16	33	2,06	Kb
29	16	30	1,88	Kb
30	16	34	2,13	Kb
31	16	37	2,31	Kb
32	16	31	1,94	Kb
33	16	27	1,69	Tb
34	16	38	2,38	Kb
35	16	31	1,94	Kb
36	16	39	2,44	Kb
37	16	36	2,25	Kb
38	16	37	2,31	Kb
39	16	38	2,38	Kb
40	16	44	2,75	Cb
41	16	39	2,44	Kb
42	16	36	2,25	Kb
43	16	37	2,31	Kb
44	16	41	2,56	Cb
45	16	38	2,38	Kb
46	16	39	2,44	Kb
47	16	41	2,56	Cb
48	16	45	2,81	Cb
49	16	36	2,25	Kb
50	16	36	2,25	Kb

lanjutan

51	16	41	2,56	Cb
52	16	41	2,56	Cb
53	16	40	2,50	Cb -
54	16	37	2,31	Kb
55	16	42	2,63	Cb
56	16	43	2,69	Cb
57	16	41	2,56	Cb
58	16	36	2,25	Kb
59	16	40	2,50	Cb
60	16	36	2,25	Kb

Data di atas apabila disajikan dalam bentuk tabel prosentase, maka akan terlihat seperti di bawah ini :

Tabel 69
Kategorisasi Skore Variabel Sosial Ekonomi

Kategori Sosial Ekonomi	Jumlah	Prosentase
Tidak baik	1	1,67
Kurang baik	33	55
Cukup baik	26	43,33
Sangat baik	-	-
Jumlah	60	100

Diolah dari : Pertanyaan No. 17 s /d 32

Berdasarkan data tabel di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa secara umum kondisi sosial ekonomi responden dapat dikategorikan kurang baik sebesar 55 % dan cukup baik sebesar 43,33 %. Dengan demikian maka dapat dikalkulasi dari 60 responden 33 responden mempunyai kondisi sosial ekonomi yang kurang baik sedangkan yang tidak baik sebesar 1,67 % atau kurang lebih 10 responden mempunyai kondisi sosial ekonomi yang tidak baik. Dengan demikian responden yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang cukup baik hanya sebesar 17 orang.

Untuk mengetahui berapa besar nilai kepemimpinan berdasarkan jawaban responden maka dipergunakan klasifikasi penilaian sebagaimana digunakan untuk mengetahui nilai sosial ekonomi responden. Dari tabel di bawah ini dapat diketahui klasifikasi penilaian variabel kepemimpinan.

Tabel 70
Klasifikasi Penilaian Variabel Kepemimpinan

No. Resp	Jumlah Item	Nilai	Mean Score	Ket
1	12	26	2,17	Kb
2	12	26	2,17	Kb
3	12	26	2,17	Kb
4	12	27	2,25	Kb
5	12	27	2,25	Kb
6	12	30	2,50	Cb
7	12	28	2,33	Kb
8	12	26	2,17	Kb
9	12	29	2,42	Kb
10	12	24	2,00	Kb
11	12	27	2,25	Kb
12	12	26	2,17	Kb
13	12	30	2,50	Cb
14	12	27	2,25	Kb
15	12	27	2,25	Kb
16	12	27	2,25	Kb
17	12	26	2,17	Kb
18	12	27	2,25	Kb
19	12	26	2,17	Kb
20	12	24	2,00	Kb
21	12	25	2,08	Kb
22	12	26	2,17	Kb
23	12	24	2,00	Kb
24	12	27	2,25	Kb
25	12	28	2,33	Kb
26	12	15	1,25	Tb
27	12	16	1,33	Tb
28	12	22	1,83	Kb
29	12	23	1,92	Kb
30	12	18	1,50	Tb
31	12	17	1,42	Tb
32	12	18	1,50	Tb
33	12	22	1,83	Kb
34	12	20	1,67	Tb
35	12	16	1,33	Tb
36	12	29	2,42	Kb
37	12	25	2,08	Kb
38	12	32	2,67	Cb
39	12	37	3,08	Cb
40	12	29	2,42	Kb
41	12	32	2,67	Cb
42	12	31	2,58	Cb
43	12	30	2,50	Cb
44	12	29	2,42	Kb
45	12	31	2,58	Cb
46	12	23	1,92	Kb
47	12	26	2,17	Kb
48	12	23	1,92	Kb
49	12	28	2,33	Kb
50	12	30	2,50	Cb

lanjutan

51	12	29	2,42	Kb
52	12	26	2,17	Kb
53	12	28	2,33	Kb
54	12	26	2,17	Kb
55	12	34	2,83	Cb
56	12	32	2,67	Cb
57	12	26	2,17	Kb
58	12	28	2,33	Kb
59	12	24	2,00	Kb
60	12	36	3,00	Cb

Tabel 71
Kategorisasi Skore Variabel Kepemimpinan

Kategori Kepemimpinan	Jumlah	Prosentase
Tidak baik	7	11,67
Kurang baik	41	68,33
Cukup baik	12	20
Sangat baik	-	-
Jumlah	60	100

Diolah dari : Pertanyaan No. 33 s / d 44

Dari tabel di atas secara umum kepemimpinan yang diterapkan atau diimplementasikan oleh kepala desa atau aparatur desa dan petugas pelaksana P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal 80 % tidak baik atau kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari prosentase jawaban responden 11,67 % berkategori tidak baik, 68,33 % berkategori kurang baik, sedang kategori cukup baik berdasarkan pendapat responden hanya 20 %. Dengan demikian pola kepemimpinan di dalam pelaksanaan P2KP di Desa Cepiring masih perlu untuk ditingkatkan sehingga program penanggulangan kemiskinan perkotaan tersebut dapat mencapai sasaran secara optimal.

Komunikasi sebagai suatu cara atau metode yang dapat digunakan untuk memotivasi atau memberikan dorongan peserta program penanggulangan kemiskinan perkotaan dapat dinilai berdasarkan jawaban responden dengan kriteria yang sama seperti dua variabel sebelumnya, maka dalam tabel di bawah ini akan disaksikan perhitungan skor dan klasifikasi pengaruh komunikasi.

Tabel 72
Klasifikasi Penilaian Variabel Komunikasi

No. Resp	Jumlah Item	Nilai	Mean Score	Ket
1	12	38	3,17	Cb
2	12	38	3,17	Cb
3	12	40	3,33	Sb
4	12	38	3,17	Cb
5	12	38	3,17	Cb
6	12	40	3,33	Sb
7	12	39	3,25	Sb
8	12	38	3,17	Cb
9	12	39	3,25	Sb
10	12	38	3,17	Cb
11	12	38	3,17	Cb
12	12	37	3,08	Cb
13	12	40	3,33	Sb
14	12	40	3,33	Sb
15	12	38	3,17	Cb
16	12	38	3,17	Cb
17	12	39	3,25	Sb
18	12	38	3,17	Cb
19	12	35	2,92	Cb
20	12	40	3,33	Sb
21	12	37	3,08	Cb
22	12	39	3,25	Sb
23	12	40	3,33	Sb
24	12	39	3,25	Sb
25	12	38	3,17	Cb
26	12	22	1,83	Kb
27	12	23	1,92	Kb
28	12	37	3,08	Cb
29	12	27	2,25	Kb
30	12	29	2,42	Kb
31	12	30	2,50	Cb
32	12	35	2,92	Cb
33	12	36	3,00	Cb
34	12	31	2,58	Cb
35	12	13	1,08	Tb
36	12	46	3,83	Sb
37	12	45	3,75	Sb
38	12	44	3,67	Sb
39	12	47	3,92	Sb
40	12	45	3,75	Sb
41	12	43	3,58	Sb
42	12	43	3,58	Sb
43	12	46	3,83	Sb
44	12	46	3,83	Sb
45	12	45	3,75	Sb
46	12	43	3,58	Sb
47	12	45	3,75	Sb
48	12	41	3,42	Sb
49	12	37	3,08	Cb
50	12	42	3,50	Sb

lanjutan

51	12	42	3,50	Sb
52	12	43	3,58	Sb
53	12	40	3,33	Sb
54	12	41	3,42	Sb
55	12	40	3,33	Sb
56	12	39	3,25	Sb
57	12	41	3,42	Sb
58	12	40	3,33	Sb
59	12	39	3,25	Sb
60	12	43	3,58	Sb

Tabel 73
Kategorisasi Skore Variabel Komunikasi

Kategori Komunikasi	Jumlah	Prosentase
Tidak baik	1	1,67
Kurang baik	4	6,67
Cukup baik	20	33,33
Sangat baik	35	58,33
Jumlah	60	100

Diolah dari : Pertanyaan No. 45 s / d 56

Dari hasil perhitungan di atas maka data skor komunikasi dalam pelaksanaan P2KP dapat diketahui sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat diindikasikan dari kategori tidak baik sebesar 1,67 % kurang baik, 6,67 % cukup baik, 33,33 % sedang sangat baik, 58,33 %. Hal ini berarti bahwa 91,66 % komunikasi antara aparatur desa dan petugas lapangan P2KP dengan responden di dalam melaksanakan P2KP sudah sangat baik.

4.2. Uji Hipotesa

4.2.1. Analisa Tabel Silang

Tabel silang ini dimaksudkan untuk mencari kecenderungan hubungan antar variabel/indikator/pertanyaan yang disilangkan atau dihubungkan.

Dalam analisa tabulasi silang, peneliti menggunakan distribusi prosentase pada sel-sel dalam tabel sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan

antara variabel-variabel penelitiannya. Karena itu cara perhitungan prosentase sangat menentukan benar-tidaknya interpretasi peneliti. Dalam perhitungan ini, prosentase responden untuk setiap kelompok dibuat sedemikian rupa agar mudah melihat hubungan antara dua variabel. Untuk itu prosentase selalu dihitung pada variabel pengaruh, atau jumlah 100 persen adalah pada kategori variabel pengaruh. Hubungan variabel-variabel penelitian, dalam hal ini efek variabel pengaruh terhadap variabel terpengaruh, dilihat dengan membandingkan distribusi prosentase pada kategori-kategori variabel pengaruh.

Tabel 74
Hubungan Status Sosial Ekonomi Dengan Efektivitas P2KP

Efektivitas P2KP Status Sosial Ekonomi	Efektivitas P2KP				Jumlah
	Sangat Tinggi	Tinggi	Cukup Tinggi	Kurang Tinggi	
Sangat Tinggi	0	0	0	6	6
	0	0	0	100 %	100 %
Tinggi	0	6	6	12	24
	0	33,3 %	33,3 %	33,3 %	100 %
Cukup Tinggi	6	6	0	0	12
	50 %	50 %	0	0	100 %
Kurang Tinggi	6	6	0	6	18
	33,3 %	33,3 %	0	33,3 %	100 %
Jumlah	12	18	6	24	60
	83,3 %	110,6 %	33,3 %	166,6 %	400 %

Sumber : variabel status sosial ekonomi dan variabel efektifitas P2KP

Hubungan antara status sosial dengan efektivitas P2KP yang diindikasikan dari latar belakang pendidikan, kemampuan ekonomi masyarakat, dan besar tanggungan keluarga dengan tingkat pemahaman terhadap program,

pilihan program dan keberhasilan program dapat dilihat dari Tabel 74. Dari tabel ini dapat dilihat tidak ada hubungan antara variabel status sosial dengan efektivitas P2KP yang dinyatakan oleh 24 responden (166,6 %).

Tabel 75
Hubungan Kepemimpinan Dengan Efektivitas P2KP

Efektivitas P2KP \ Kepemimpinan	Sangat Tinggi	Tinggi	Cukup Tinggi	Kurang Tinggi	Jumlah
Sangat Tinggi	6 33,3 %	6 33,3 %	6 33,3 %	0 0	18 100 %
Tinggi	0 0	12 66,7 %	0 0	6 33,3 %	18 100 %
Cukup Tinggi	6 33,3 %	0 0	0 0	12 66,7 %	18 100 %
Kurang Tinggi	0 0	0 0	6 100 %	0 0	6 100 %
Jumlah	12 66,6 %	18 100 %	12 133,3 %	18 100 %	60 400 %

Sumber : variabel kepemimpinan dan variabel efektifitas P2KP

Tabel silang ini menunjukkan tidak adanya pengaruh atau hubungan variabel kepemimpinan dengan variabel efektivitas P2KP. Hasil perhitungan dinyatakan oleh 18 responden (100 %).

Tabel 76
Hubungan Komunikasi Dengan Efektivitas P2KP

Efektivitas P2KP / Komunikasi	Sangat Tinggi	Tinggi	Cukup Tinggi	Kurang Tinggi	Jumlah
Sangat Tinggi	6 50 %	6 50 %	0 0	0 0	12 100 %
Tinggi	0 0	0 0	12 100 %	0 0	12 100 %
Cukup Tinggi	0 0	12 100 %	0 0	0 0	12 100 %
Kurang Tinggi	6 25 %	0 0	0 0	18 75 %	24 100 %
Jumlah	12 75 %	18 150 %	12 100 %	18 75 %	60 400 %

Sumber : variabel komunikasi dan variabel efektifitas P2KP

Hubungan antara variabel komunikasi dengan variabel efektivitas P2KP yang dihitung dari indikator dan sub indikatornya ternyata dari hasil penelitian terbukti berpengaruh cukup tinggi yang dinyatakan oleh 18 responden (150 %).

4.2.2. Analisa Statistik

Uji hipotesa dengan menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat dimaksudkan untuk menguji hipotesa yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Ada hubungan status sosial ekonomi dengan efektivitas P2KP.
2. Ada hubungan kepemimpinan dengan efektivitas P2KP.
3. Ada hubungan komunikasi dengan efektivitas P2KP.
4. Ada hubungan status sosial ekonomi, kepemimpinan, dan komunikasi, dengan efektivitas P2KP.

Untuk membuktikan hipotesa di atas dengan menggunakan rumus Rank Kendall, maka hubungan antar variabel dihitung rankingnya seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 77
Hubungan Antar Variabel Berdasarkan Ranking

No. Resp	Rank	x1	Rank	x2	Rank	x3	Rank	y
1	3	29	10	26	10	38	7	40
2	7	34	10	26	10	38	8	41
3	8	35	10	26	12	40	11	44
4	15	42	11	27	10	38	4	37
5	15	42	11	27	10	38	7	40
6	13	40	14	30	12	40	12	45
7	13	40	12	28	11	39	10	43
8	11	38	10	26	10	38	9	42
9	14	41	13	29	11	39	3	36
10	1	26	8	24	10	38	10	43
11	19	49	11	27	10	38	3	36
12	19	49	10	26	9	37	7	40
13	11	38	14	30	12	40	12	45
14	18	45	11	27	12	40	7	40
15	18	45	11	27	10	38	7	40
16	18	45	11	27	10	38	4	37
17	10	37	10	26	11	39	8	41
18	17	44	11	27	10	38	4	37
19	9	36	10	26	8	35	7	40
20	15	42	8	24	12	40	3	36
21	16	43	9	25	9	37	8	41
22	15	42	10	26	11	39	8	41
23	12	39	8	24	12	40	8	41
24	12	39	11	27	11	39	9	42
25	18	45	12	28	10	38	3	36
26	8	35	1	15	2	22	1	33
27	5	31	2	16	3	23	10	43
28	6	33	6	22	9	37	13	46
29	4	30	7	23	4	27	11	44
30	7	34	4	18	5	29	6	39
31	10	37	3	17	6	30	6	39
32	5	31	4	18	8	35	18	51
33	2	27	6	22	9	36	18	51
34	11	38	5	20	7	31	5	38
35	5	31	2	16	1	13	7	40
36	12	39	13	29	18	46	19	52
37	9	36	9	25	17	45	18	51
38	10	37	16	32	16	44	18	51
39	11	38	19	37	19	47	16	49
40	17	44	13	29	17	45	19	52
41	12	39	16	32	15	43	20	53
42	9	36	15	31	15	43	15	48
43	10	37	14	30	18	46	13	46
44	14	41	13	29	18	46	9	42
45	11	38	15	31	17	45	13	46
46	12	39	7	23	15	43	12	45
47	14	41	10	26	17	45	21	56
48	18	45	7	23	13	41	10	43
49	9	36	12	28	9	37	17	50
50	9	36	14	30	14	42	13	46

lanjutan

51	14	41	13	29	14	42	2	34
52	14	41	10	26	15	43	17	50
53	13	40	12	28	12	40	14	47
54	10	37	10	26	13	41	17	50
55	15	42	17	34	12	40	19	52
56	16	43	16	32	11	39	14	47
57	14	41	10	26	13	41	12	45
58	9	36	12	28	12	40	12	45
59	13	40	8	24	11	39	16	49
60	9	36	18	36	15	43	17	50

Dari daftar ranking di atas diketahui bahwa :

1. Variabel sosial ekonomi ekonomi mempunyai ranking 1 - 19.
2. Variabel kepemimpinan mempunyai ranking 1 - 19
3. Variabel komunikasi mempunyai ranking 1 - 19
4. Variabel efektivitas P2KP mempunyai ranking 1 - 21

Untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka hanya diambil dari ranking 1 - 12 dengan perhitungan lebih besar dari 50 %.

4.2.2.1. Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi dengan Efektivitas P2KP

Tabel 78

Hubungan Status Sosial Ekonomi Dengan Efektivitas P2KP

Ranking Sosial Ekonomi	Ranking Efektivitas P2KP
1	10
2	18
3	7
4	11
5	7
6	13
7	8
8	11
9	7
10	6
11	5
12	19

Tabel 79

Tanda + Tanda -

Ranking	Tanda +	Tanda -
Ranking 1	5	6
Ranking 18	1	10
Ranking 7	9	2
Ranking 11	3	8
Ranking 7	9	2

Ranking 13	2	9
Ranking 8	6	5
Ranking 11	3	8
Ranking 7	9	2
Ranking 6	10	1
Ranking 5	11	0
Ranking 19	0	11

Maka,

$$\begin{aligned}
 S &= (5 - 6) + (1 - 10) + (9 - 2) + (3 - 8) + (9 - 2) + (2 - 9) + (6 - 5) \\
 &+ (3 - 8) + (9 - 2) + (10 - 1) + (11 - 0) + (0 - 11) \\
 &= (-1) + (-9) + (+7) + (-5) + (+7) + (-7) + (1) + (-5) + (7) + (9) + (11) \\
 &+ (0) \\
 &= (-27) + (42)
 \end{aligned}$$

$$S = 15$$

Koefisien korelasi Kendall :

$$T = \frac{S}{\frac{1}{2} N (N - 1)}$$

$$T = \frac{15}{\frac{1}{2} \cdot 12 (12 - 1)}$$

$$T = \frac{15}{66}$$

$$T = 0,227$$

UPT-PUSTAK-UNDIP

Uji T dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 ZH &= \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}} \\
 &= \frac{0,227}{\sqrt{\frac{2(2 \cdot 12 + 5)}{9 \cdot 12(12-1)}}} \\
 &= \frac{0,227}{\sqrt{\frac{58}{1188}}} \\
 &= \frac{0,227}{0,22} \\
 ZH &= 1,03
 \end{aligned}$$

Taraf Signifikan : pada taraf 5 % = 2,58

Kriteria :

H0 diterima, jika $ZH < 2,58$

Ha diterima, jika $ZH > 2,58$

$ZH = 1,03 < 2,58$ berarti H0 diterima

Kesimpulan :

Tidak ada korelasi status sosial ekonomi dengan efektivitas P2KP

4.2.2.2. Hubungan Antara Kepemimpinan dengan Efektivitas P2KP

Tabel 80

Hubungan Kepemimpinan Dengan Efektivitas P2KP

Ranking Kepemimpinan	Rangking Efektivitas P2KP
1	1
2	10
3	6
4	18
5	5
6	18
7	11
8	10
9	8
10	8
11	9
12	3

Tabel 81

Tanda + Tanda -

Ranking	Tanda +	Tanda -
Ranking 1	11	0
Ranking 10	4	7
Ranking 6	8	3
Ranking 18	1	10
Ranking 5	9	2
Ranking 18	1	10
Ranking 11	2	9

Ranking 10	4	7
Ranking 8	7	4
Ranking 8	7	4
Ranking 9	5	6
Ranking 3	10	1

Maka,

$$\begin{aligned}
 S &= (11 - 0) + (4 - 7) + (8 - 3) + (1 - 10) + (9 - 2) + (1 - 10) + \\
 &(2 - 9) + (4 - 7) + (7 - 4) + (7 - 4) + (5 - 6) + (10 - 1) \\
 &= (+11) + (-3) + (+5) + (-9) + (+7) + (-9) + (-7) + (-3) + (+3) + (+3) + \\
 &(-1) + (9) \\
 &= (+38) - (34)
 \end{aligned}$$

$$S = 4$$

Koefisien korelasi Kendall :

$$T = \frac{S}{\frac{1}{2} N (N - 1)}$$

$$T = \frac{4}{\frac{1}{2} \cdot 12 (12 - 1)}$$

$$T = \frac{4}{66}$$

$$T = 0,060$$

Uji T dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 ZH &= \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}} \\
 &= \frac{0,060}{\sqrt{\frac{2(2 \cdot 12 + 5)}{9 \cdot 12(12-1)}}} \\
 &= \frac{0,060}{\sqrt{\frac{58}{1188}}} \\
 &= \frac{0,60}{0,220} \\
 ZH &= 0,272
 \end{aligned}$$

Taraf Signifikan : pada taraf 5% = 2,58

Kriteria :

H₀ diterima, jika ZH < 2,58

H_a diterima, jika ZH > 2,58

ZH = 0,272 < 2,58 berarti H₀ diterima

Kesimpulan :

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan tidak ada pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

4.2.2.3. Hubungan Antara Komunikasi dengan Efektivitas P2KP

Tabel 82

Hubungan Komunikasi Dengan Efektivitas P2KP

Ranking Komunikasi	Rangking Efektivitas P2KP
1	7
2	1
3	10
4	11
5	6
6	6
7	5
8	18
9	18
10	4
11	8
12	3

Tabel 83
Tanda + Tanda -

Ranking	Tanda +	Tanda -
Ranking 7	5	6
Ranking 1	11	0
Ranking 10	3	8
Ranking 11	2	9
Ranking 6	7	4
Ranking 6	7	4
Ranking 5	8	3
Ranking 18	1	10
Ranking 18	1	10
Ranking 4	10	1
Ranking 8	4	7
Ranking 3	10	1

Maka,

$$\begin{aligned}
 S &= (5 - 6) + (11 - 0) + (3 - 8) + (2 - 9) + (7 - 4) + (7 - 4) + (8 - 3) \\
 &+ (1 - 10) + (1 - 10) + (10 - 1) + (4 - 7) + (10 - 1) \\
 &= (-1) + (+11) + (-5) + (-7) + (+3) + (+3) + (+5) + (-9) + (-9) + (9) \\
 &+ (-3) + (9) \\
 &= (-34) + (40)
 \end{aligned}$$

$$S = 6$$

Koefisien korelasi Kendall :

$$T = \frac{S}{\frac{1}{2} N (N - 1)}$$

$$T = \frac{6}{\frac{1}{2} \cdot 12 (12 - 1)}$$

$$T = \frac{6}{66}$$

$$T = 0,090$$

Uji T dengan rumus :

$$ZH = \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N + 5)}{9N(N - 1)}}}$$

$$= \frac{0,090}{\sqrt{\frac{2(2 \cdot 12 + 5)}{9 \cdot 12 (12 - 1)}}$$

$$= \frac{0,090}{\sqrt{\frac{58}{1188}}}$$

$$= \frac{0,090}{0,22}$$

$$ZH = 0,409$$

Taraf Signifikan : pada taraf 5 % = 2,58

Kriteria :

H₀ diterima, jika $ZH < 2,58$

H_a diterima, jika $ZH > 2,58$

$ZH = 0,409 < 2,58$ berarti H₀ diterima

Kesimpulan :

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh komunikasi dengan efektivitas P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Untuk menguji apakah variabel status sosial ekonomi, kepemimpinan, dan komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, maka akan di uji 8 (delapan) pasangan pengamatan sebagai berikut :

**4.2.2.4. Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi, Kepemimpinan,
Komunikasi dengan Efektivitas P2KP**

Tabel 84

Hubungan Status Sosial Ekonomi, Kepemimpinan, Komunikasi Dengan
Efektivitas P2KP

Variabel	A	B	C	D	E	F	G	H
Sosial Ekonomi	1	2	3	4	5	6	7	8
Kepemimpinan	8	6	10	7	2	6	4	1
Komunikasi	10	9	10	4	3	9	5	2
Efektivitas P2KP	10	18	7	11	10	13	6	1
Rj	29	35	30	26	20	34	22	12

$$R_j = \frac{\sum R_i}{N}$$

$$= \frac{29 + 35 + 30 + 26 + 20 + 34 + 22 + 12}{8}$$

$$R_j = 26$$

Nilai S dihitung dari :

$$S = (29 - 26)^2 + (35 - 26)^2 + (30 - 26)^2 + (20 - 26)^2 +$$

$$(34 - 26)^2 + (22 - 26)^2 + (12 - 26)^2$$

$$= (3)^2 + (9)^2 + (4)^2 + (-6)^2 + (8)^2 + (-4)^2 + (-14)^2$$

$$= 9 + 81 + 16 + 36 + 64 + 16 + 196$$

$$S = 418$$

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2} k^2 (N^3 - N)}$$

$$= \frac{418}{\frac{1}{2} \cdot (3)^2 (8^3 - 8)}$$

$$= \frac{418}{\frac{1}{2} (9) (512 - 8)}$$

$$= \frac{418}{\frac{1}{2} \cdot (9) (504)}$$

$$= \frac{418}{378}$$

$$W = 1,105$$

Hal ini menunjukkan bahwa derajat asosiasi dari ketiga variabel 1,105.

Untuk menguji signifikan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap variabel terikat, maka dalam tabel Kendall Coefficient of Concordance.

$$K = 3$$

$$N = 7$$

$$\alpha = 5\%$$

$$\text{Nilai kritis} = 157,3$$

Sehingga dari hasil perhitungan di atas diketahui :

$S_{hitung} > S_{tabel}$

$418 > 157,3$

Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel kondisi status sosial ekonomi, kepemimpinan, komunikasi dengan efektivitas P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal saling mempengaruhi.

Dari hasil perhitungan SPSS juga dapat ditarik kesimpulan variabel yang mempunyai pengaruh terhadap efektivitas ialah variabel kepemimpinan dan komunikasi. Hasil perhitungan SPSS menunjukkan korelasi kepemimpinan terhadap efektivitas P2KP sebesar 0,208 sedangkan komunikasi terhadap efektivitas sebesar 0,402. Korelasi tersebut terjadi pada tingkat signifikan dengan nilai kepercayaan 5 % untuk kepemimpinan dengan efektivitas dan tingkat kepercayaan 1 % untuk komunikasi dengan efektivitas P2KP. Sehingga dapat dikatakan pengaruh variabel bebas kepemimpinan dan komunikasi secara sendiri-sendiri memang ada, hanya saja sangat kecil.

4.3. Diskusi

Dari hasil perhitungan ternyata hipotesa yang terbukti hanya hipotesa mayor yaitu semakin tinggi status sosial ekonomi, kepemimpinan dan komunikasi semakin tinggi pula efektivitas P2KP. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa derajat asosiasi dari ketiga variabel 1,105. Untuk menguji signifikan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap variabel terikat, maka dalam Tabel Kendall Coefficient of Concordance.

$$K = 3$$

$$N = 7$$

$$\alpha = 5\%$$

$$\text{Nilai kritis} = 157,3$$

Sehingga dari hasil perhitungan di atas diketahui :

$$S \text{ hitung} > S \text{ tabel}$$

$$418 > 157,3$$

Sedang untuk hipotesa minor tidak dapat dibuktikan. Dari perhitungan SPSS hanya ditemukan hasil perhitungan yang kecil.

$$X1Y = -0,169$$

$$X2Y = 0,208$$

$$X3Y = 0,402$$

Untuk hasil perhitungan statistik Rank Kendall :

$$X1Y \text{ koefisien korelasi } T = 0,227 ; ZH = 1,03 < 2,58$$

$$X2Y \text{ koefisien korelasi } T = 0,060 ; ZH = 0,27 < 2,58$$

$$X3Y \text{ koefisien korelasi } T = 0,090 ; ZH = 0,409 < 2,58$$

Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi, kepemimpinan, komunikasi dan efektivitas P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal saling mempengaruhi.

Kalau didasarkan dari hasil perhitungan SPSS maka dapat diinterpretasikan pengaruh atau hubungan variabel kepemimpinan terhadap efektivitas P2KP hanya sebesar 20,8 % (0,208). Sedang dipengaruhi faktor-faktor lain sebesar 79,2 %, demikian pula dengan pengaruh variabel komunikasi terhadap efektivitas hanya 40,2 % (0,402) berarti 59,8 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Oleh karena itu ketika variabel bebas status sosial ekonomi, kepemimpinan dan komunikasi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap efektivitas P2KP berkisar antara 20 % sampai 40 % sedang 60 % sampai 80 % efektivitas P2KP dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian. Faktor lain tersebut mungkin dapat berupa faktor politik, budaya, birokrasi, organisasi, manajemen, maupun faktor-faktor yang lain. Sehingga untuk dapat mengefektifkan program-program pembangunan yang berkaitan dengan kemiskinan, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan menerapkan paradigma kebijakan publik dimana semua kebijakan harus berorientasi pada kepentingan, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat penerima program. Untuk peneliti lain disarankan agar menggunakan variabel lain di dalam mengkaji tingkat efektivitas program pembangunan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dari uji statistik status sosial ekonomi tidak ada hubungan dengan efektifitas program. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil perhitungan koefisien korelasi $T = 0,227 > 0,05$ sehingga tidak korelasi, sedang uji signifikan $ZH < ZT$ atau $1,03 < 2,58$ jadi tidak signifikan. Tetapi pembuktian secara kualitatif (deskriptif) dapat dilihat dalam Tabel 29 yang menunjukkan data 6,67 % P2KP diikuti oleh masyarakat yang berpenghasilan di atas Rp. 250.000,- per bulan, sedang yang berpenghasilan antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- per bulan sebesar 20 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal telah memenuhi sasaran dengan nilai kekurangan 6,67 % peserta program yang berpenghasilan di atas Rp. 250.000,- per bulan. Atau dengan kata lain pelaksanaan P2KP di Desa Cepiring diikuti oleh 93,33 % sesuai dengan sasaran program. Sedang pendapatan tambahan yang diperoleh peserta P2KP dapat dilihat dari Tabel 31 bahwa 53,33 % memperoleh tambahan Rp. 5000,- sampai Rp. 10.000,- per bulan, yang memperoleh tambahan Rp. 25.000,- sampai Rp. 50.000,- sebesar 13,33 %

dan yang memperoleh tambahan Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,- per bulan 31,67 %. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara sosial ekonomi P2KP menguntungkan peserta program. Keuntungan tersebut akan semakin nyata apabila dibandingkan dengan pengeluaran biaya hidup per bulan 43,33 % peserta P2KP kurang lebih Rp. 150.000,- (lihat Tabel 39).

2. Dari uji statistik kepemimpinan tidak ada hubungan dengan efektifitas program. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil perhitungan koefisien korelasi $T = 0,060 > 0,05$ sehingga tidak korelasi, sedang uji signifikan $ZH < ZT$ atau $0,27 < 2,58$ jadi tidak signifikan. Secara deskripsi pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas P2KP yang diambil dari hasil perhitungan rata-rata prosentase jawaban responden dapat dilihat dari Tabel 41 dimana peserta merasa puas karena dipercaya oleh aparatur kelurahan 61,67 %. Kepemimpinan yang dalam penelitian diindikasikan dari pujian kepala desa, petunjuk dan bimbingan aparatur desa, contoh dari aparatur desa, peranan aparatur desa dalam memecahkan masalah ternyata dibutuhkan oleh peserta program tetapi tidak dilaksanakan oleh kepala desa maupun aparatur desa sebagaimana terlihat dalam Tabel 43 sampai Tabel 47. Dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen (26,67 %) sampai 66,67 % responden menyatakan kepemimpinan aparatur desa hanya dilakukan kadang-kadang. Sehingga dapat disimpulkan variabel kepemimpinan yang sebenarnya cukup

berpengaruh terhadap efektivitas program kurang mendapat perhatian dari aparat desa maupun petugas lapangan P2KP.

3. Dari uji statistik komunikasi tidak ada hubungan dengan efektifitas program. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil perhitungan koefisien korelasi $T = 0,090 > 0,05$ sehingga tidak korelasi, sedang uji signifikan $ZH < ZT$ atau $0,409 < 2,58$ jadi tidak signifikan. Tetapi pengaruh komunikasi terhadap efektivitas P2KP secara kualitatif besar pengaruhnya terhadap efektivitas P2KP hal tersebut ditunjukkan dalam Tabel 52 bahwa responden yang menyatakan selalu mendapat bimbingan 55 %, kadang-kadang mendapat bimbingan 35 %. Demikian pula dalam Tabel 54 pembinaan staf kelurahan 76,67 % menyatakan selalu memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan P2KP. Sedang dalam Tabel 57 mengenai persepsi responden terhadap tanggapan petugas lapangan 76,67 % menyatakan selalu ditanggapi dengan baik. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan dengan baik akan mendorong peserta program melaksanakan program dengan baik pula.
4. Dalam pengujian hipotesa ada dan tidaknya hubungan status sosial ekonomi, kepemimpinan, dan komunikasi dengan efektivitas P2KP terbukti saling mempengaruhi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil perhitungan dimana S hasil perhitungan lebih besar dari S tabel yaitu $418 > 157,3$. Jadi kesimpulannya ada faktor saling mempengaruhi diantara variabel-variabel

sosial ekonomi, kepemimpinan, komunikasi dan efektivitas P2KP. Dari analisa hubungan antar variabel secara umum kondisi sosial ekonomi responden dapat dikategorikan kurang baik sebesar 55 % dan cukup baik sebesar 43,33 %. Untuk responden yang mempunyai kondisi sosial ekonomi tidak baik hanya sebesar 1,67 % (lihat Tabel 69). Untuk mengetahui berapa besar nilai kepemimpinan berdasarkan jawaban responden maka diperoleh hasil perhitungan kepemimpinan yang diterapkan atau diimplementasikan oleh kepala desa atau aparatur desa dan petugas pelaksana P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal 80 % tidak baik atau kurang baik (lihat Tabel 71). Sedang komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terindikasi dari jawaban responden komunikasi tidak baik sebesar 1,67 %, kurang baik sebesar 6,67 %, cukup baik 33,33 %, sedang sangat baik sebesar 58,33 % (lihat Tabel 73). Hal ini berarti bahwa 91,66 % komunikasi antar aparatur desa dan petugas lapangan P2KP dengan responden sudah sangat baik. Penilaian terhadap efektif atau tidaknya P2KP yang dilaksanakan di Desa Cepiring dapat dilihat dalam Tabel 67, prosentase hasil perhitungan kategori jawaban responden 71,67 % menyatakan cukup baik dan 8,33 % menyatakan sangat baik, sedang yang menyatakan tidak baik sebesar 20 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas P2KP di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal 80 % berkategori cukup baik.

5.2. Saran

1. Di dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) masih diperlukan adanya seleksi di antara peserta program, karena ternyata banyak peserta yang sebenarnya di luar klasifikasi ketentuan P2KP yaitu mereka yang berpendapatan per bulan lebih dari Rp. 250.000,-, rumah tangga dan pengangguran. Sehingga dengan sistem seleksi yang ketat sesuai ketentuan akan menjadikan efektivitas P2KP semakin tinggi.
2. Perlu dilaksanakannya pola kepemimpinan yang lebih sesuai dengan sistem budaya masyarakat sehingga dapat membantu pelaksanaan program-program pemerintah terutama yang mempunyai sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat diketahui faktor kepemimpinan masih sangat dibutuhkan tetapi dirasakan masih kurang oleh responden.
3. Komunikasi yang tercipta memang sudah cukup baik, hanya perlu diberi bobot materi komunikasi sesuai dengan kepemimpinan yang dibutuhkan oleh masyarakat responden peserta program. Komunikasi yang dilakukan hendaknya tetap berorientasi pada bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh aparatur desa maupun petugas lapangan yang berorientasi meningkatkan pemahaman manajemen yang baik kepada masyarakat sasaran.

4. Mengingat adanya saling mempengaruhi antara faktor sosial ekonomi, kepemimpinan, dan komunikasi terhadap efektivitas program maka disarankan hendaknya pemerintah di dalam setiap memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat berorientasi kepada kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan masyarakat sasaran sehingga setiap program akan mencapai efektivitas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid S. Susanto Phil., *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jammare, 1991
- Cheema G. Shabbir, *Administrations of Regional and Local Development*, Nagoya, Japan, 1983
- David L. Londuon dan Albert J. Sella Bitta, *Consumer Behavior, Concepts dan Applications*, Third Edition. Mc. Graw Hill Book Company, Singapura, 1988
- Ero H. Rosyidi, *Pengantar Sosiologi*, Alumni, Bandung, 1987
- Fred N. Kerlinger dan Elazar J. Pedhazur, *Korelasi dan Analisis Regresi Ganda*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1987
- Gerungan, *Psycologi Social*, PT. Eresco, Bandung-Jakarta, 1998
- Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, BPFE, Yogyakarta, 1990
- Ida Bagoes Mantra dan Kasto, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, 1995
- Ismangun, *Suatu pengantar Singkat Antologi*, Jilid II, Jammare, 1991
- Joseph S Roucek dan Roland L. Warren, *Pengantar Sosiologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1994
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985
- Korten D.C dan Sjahrir, Penerjemah A. Setiawan Abadi, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998
- Laporan JPS*, BAPEDA JATENG, 1999
- Melly G. Tan dan Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Mubyarto dan Ari Basuki, *Seminar Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta, 1989
- Mulyanto Sumardi dan Hans Lieters Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991
- Muri A. Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Samsubar Saleh, *Statistik Non Parametrik*, BPFE, Yogyakarta, 1986
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982
- Soedibiyono, *Ekonomi Makro, Analisa dan Permintaan Penawaran Agregatif*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Soelaiman Joesoef dan Slamet Santoso, *Pengantar Pendidikan Sosial, Usaha Nasional*, Surabaya, 1991
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001
- Suwarno, *Pengetahuan Umum Pendidikan*, Aksara Baru, Jakarta, 1992
- Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bina Aksara, Jakarta, 1992